

**PENGARUH JUMLAH DANA PIHAK KETIGA, INFLASI,
DAN TINGKAT MARGIN TERHADAP ALOKASI
PEMBIAYAAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
(Studi pada Bank-Bank Syariah di Indonesia)**

SKRIPSI

Oleh

LULUK CHORIDA
NIM : 06610039



**JURUSAN MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2010**

**PENGARUH JUMLAH DANA PIHAK KETIGA, INFLASI,
DAN TINGKAT MARGIN TERHADAP ALOKASI
PEMBIAYAAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
(Studi pada Bank-Bank Syariah di Indonesia)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada:
Universitas Islam Negeri (UIN)
Maulana Malik Ibrahim Malang
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan dalam
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)

Oleh

LULUK CHORIDA
NIM : 06610039



**JURUSAN MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2010**

LEMBAR PERSETUJUAN

**PENGARUH JUMLAH DANA PIHAK KETIGA, INFLASI,
DAN TINGKAT MARGIN TERHADAP ALOKASI
PEMBIAYAAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
(Studi pada Bank-Bank Syariah di Indonesia)**

SKRIPSI

Oleh

LULUK CHORIDA

NIM : 06610039

Telah Disetujui 20 Maret 2010
Dosen Pembimbing,

Indah Yuliana, SE., MM
NIP 19740918 200312 2 004

Mengetahui :
Dekan,

Drs. HA. MUHTADI RIDWAN, MA
NIP 19550302 198703 1 004

LEMBAR PENGESAHAN
**PENGARUH JUMLAH DANA PIHAK KETIGA, INFLASI,
DAN TINGKAT MARGIN TERHADAP ALOKASI
PEMBIAYAAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
(Studi pada Bank-Bank Syariah di Indonesia)**

SKRIPSI

Oleh

LULUK CHORIDA
NIM : 06610039

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Dan Dinyatakan Diterima Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)
Pada tanggal 03 April 2010

Susunan Dewan Penguji	Tanda Tangan
1. Ketua Penguji <u>H. Misbahul Munir, Lc., M.Ei</u> NIP 19750707 200501 1 005	: ()
2. Sekretaris/ Pembimbing <u>Indah Yuliana, SE., MM</u> NIP 19740918 200312 2 004	: ()
3. Penguji Utama <u>Drs. HA. Muhtadi Ridwan, MA</u> NIP 19550302 198703 1 004	: ()

Mengetahui :
Dekan,

Drs. HA. MUHTADI RIDWAN, MA
NIP 19550302 198703 1 004

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Luluk Chorida
NIM : 06610039
Alamat : Jl. Kauman No. 10 RT 03/ RW 11 Gondanglegi-Malang.

Menyatakan bahwa "Skripsi" yang saya buat untuk memenuhi persyaratan kelulusan pada Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

PENGARUH JUMLAH DANA PIHAK KETIGA, INFLASI, DAN TINGKAT MARGIN TERHADAP ALOKASI PEMBIAYAAN USAHA KECIL DAN MENENGAH (Studi pada Bank-Bank Syariah di Indonesia)

Adalah hasil karya saya sendiri, bukan "**duplikasi**" dari karya orang lain.

Selanjutnya apabila di kemudian hari ada "**Klaim**" dari pihak lain, bukan menjadi tanggungjawab Dosen Pembimbing dan atau pihak Fakultas Ekonomi, tetapi menjadi tanggung jawab saya sendiri.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Malang, 22 Maret 2010
Hormat saya,

Luluk Chorida
NIM: 06610039

HALAMAN PERSEMBAHAN

Sebagai ungkapan syukur yang tak ternilai pada mereka yang telah mewarnai
hidupku jadi lebih bermakna, dengan rasa cinta yang mendalam
kupersembahkan karya ini padamu:

Ayahanda H. Munif Faqih & ibunda Hj. Chusniatul Afifah:

“terima kasih atas semua yang telah berikan padaku, Luluk bukanlah apa-apa
tanpa dukungan dan doa Ayah dan Ibu.

MOTTO

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

Artinya:

Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak. (QS. al-Hadid: 11)

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah segala puji syukur kita panjatkan kepada Rabbul Izzati yang telah mengatur roda kehidupan pada porosnya dengan keteraturan, dan hanya kepada-Nyalah kita menundukkan hati dengan mengokohkan keimanan dan Izzah kita dalam keridhoan-Nya. Karena berkat Rahman dan Rahim-Nya sehingga mampu menyelesaikan penyusunan laporan hasil identifikasi kasus (skripsi) dengan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Jumlah Dana, Inflasi, Dan Margin Terhadap Pembiayaan Usaha Kecil Dan Menengah (Studi pada Bank-Bank Syariah di Indonesia)”**

Sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita yaitu Rasulullah SAW, karena atas perjuangan beliau kita dapat merasakan kehidupan yang lebih bermatabat dengan kemajuan ilmu pengetahuan yang didasarkan pada iman dan Islam.

Dengan penuh rasa syukur, penulis menyampaikan ucapan terimakasih dan teriring do'a kepada semua pihak yang telah membantu. Untuk itu, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Abah (H. Munif Faqih) dan Umi (Hj. Chusniatul Afifah) serta saudara-saudaraku tercinta yang dengan segala ketulusannya senantiasa mendo'akan, mengarahkan, memberi kepercayaan, dan dukungan kepada kami baik materi, moril maupun spiritual.

2. Bapak Prof. Dr. H. Imam Suprayogo, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang beserta stafnya yang senantiasa memberikan pelayanan yang baik.
3. Bapak Drs. HA. Muhtadi Ridwan, MA, Selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Ibu Indah Yuliana, SE., MM selaku dosen pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu, memberikan kontribusi tenaga dan pikiran, guna memberikan bimbingan dan petunjuk serta pengarahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat selesai.
5. Segenap Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang telah banyak berperan aktif dalam menyumbangkan ilmu, wawasan dan pengetahuannya kepada penulis.
6. Seluruh sahabat karibku di Program Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
7. Seluruh sahabat karibku di KOPMA Padang Bulan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberi dukungan motivasi.
8. Kepada semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang dengan ikhlas menyayangi dan membantu saya.

Teriring do'a semoga amal yang telah kita lakukan dijadikan amal yang tiada putus pahalanya, dan bermanfaat untuk kita semua di dunia maupun di akhirat.

Amiiien.

Penulis menyadari sepenuh dan seteguh hati bahwa penyelesaian tugas akhir ini masih jauh dari kata sempurna karena keterbatasan kemampuan, pengetahuan, wawasan dan pengalaman penulis. Untuk itu penulis sangat mengharap kritik dan saran rekonstruksi dari semua kalangan dan pihak untuk kematangan di masa yang akan datang

Malang, 20 Maret 2010

Penulis

Luluk Chorida

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
M O T T O	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
ABSTRAK	xvii
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Batasan Masalah.....	8
1.5 Manfaat Penelitian.....	8
BAB II : KAJIAN PUSTAKA.....	10
2.1 Penelitian Terdahulu.....	10
2.2. Landasan Teori	19
2.2.1 Pengertian Sumber Dana	19
2.2.2 Inflasi.....	24
2.2.3 Inflasi dalam Prespektif Islam	30
2.2.4 Pembiayaan UKM Berdasarkan Prinsip Syariah.....	31
2.2.5 Pengertian Pembiayaan	41
2.2.6 Pendekatan Pembiayaan	45
2.2.7 Resiko Pembiayaan Bermasalah	48
2.2.8 Pengertian Usaha Kecil dan Menengah.....	50
2.2.9 Penyebab Kegagalan Pembiayaan UKM	54
2.2.10 UKM dalam Prespektif Islam.....	55
2.2.11 Pengertian Bank Syariah	58
2.3 Kerangka Berfikir	62
2.4 Hipotesis Penelitian	63
BAB III : METODE PENELITIAN.....	64
3.1 Lokasi Penelitian	64
3.2 Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	64
3.3 Populasi dan Sampel.....	65

3.3.1	Populasi	65
3.3.2	Sampel.....	65
3.4	Data dan Sumber Data.....	66
3.4.1	Metode Pengumpulan Data	66
3.4.2	Sumber Data	66
3.5	Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel	66
3.5.1	Variabel Terikat (Dependent Variabel).....	66
3.5.1	Variabel Bebas (Independent Variabel)	67
3.6	Model Analisis Data.....	67
3.6.1	Uji Independensi Variabel.....	67
3.6.2	Uji Asumsi Regresi Linier Berganda	69
 BAB IV : ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN .73		
4.1	Gambaran Umum Objek Penelitian.....	73
4.1.1	Kondisi Bank Syariah di Indonesia	73
4.1.2	Peran UKM Dalam Perekonomian Indonesia	75
4.1.3	Kebijakan Bank Indonesia dan Bank-Bank Syariah dalam Penyaluran Pembiayaan (Kredit) UKM.....	82
4.1.4	Kebijakan Pemerintah dalam Mengembangkan UKM di Indonesia.....	83
4.1.5	Kondisi Historis UKM di Indonesia.....	86
4.2	Deskripsi Hasil Penelitian	88
4.2.1	Pembiayaan UKM Bank Syariah di Indonesia.....	88
4.2.2	Jumlah Penghimpunan Dana Pihak Ketiga Bank Syariah di Indonesia.....	91
4.2.3	Tingkat Inflasi di Indonesia Masa Penelitian	93
4.2.4	Tingkat Margin Pembiayaan UKM Bank Syariah Di Indonesia.....	95
4.3	Pengujian Statistik	97
4.3.1	Analisis Regresi Linier Berganda.....	97
4.4	Hasil Uji Hipotesis Statistik	99
4.4.1	R Square (R^2).....	99
4.4.2	Analisis Varian (Hasil dari Uji F)	100
4.4.3	Analisis T-test.....	101
4.4.4	Uji Asumsi Klasik	103
4.5	Pembahasan Hasil Penelitian.....	108
4.5.1	Pengaruh Jumlah Dana Pihak Ketiga, Inflasi, dan Tingkat Margin Secara Simutan Terhadap Alokasi Pembiayaan UKM	108
4.5.2	Pengaruh Jumlah Dana Pihak Ketiga, Inflasi, dan Tingkat Margin Secara Individu Terhadap Alokasi Pembiayaan UKM	110
4.5.3	Jumlah Dana Pihak Ketiga Mempunyai Pengaruh Dominan Terhadap Alokasi Pembiayaan UKM.....	115

BAB V	: PENUTUP	117
	Kesimpulan	117
	Saran	119
DAFTAR PUSTAKA		122
LAMPIRAN		125

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	: Jumlah Unit UKM di Indonesia 2006-2008.....	2
Tabel 2.1	: Penelitian Terdahulu	15
Tabel 2.2	: Perbedaan Antara Bunga dan Bagi Hasil	38
Tabel 2.3	: Sumber Dana di Bank Syariah	47
Tabel 3.1	: Metode Analisis	72
Tabel 4.1	: Penyerapan Tenaga Kerja Menurut Skala Usaha.....	78
Tabel 4.2	: Pola Hubungan Kerjasama Perusahaan Besar-Kecil-Menengah	87
Tabel 4.3	: Jumlah Alokasi Pembiayaan UKM Bank-Bank Syariah	90
Tabel 4.4	: Jumlah Penghimpunan Dana Pihak Ketiga Bank Syariah	92
Tabel 4.5	: Laju Inflasi indonesia Tahun 2007-2009	94
Tabel 4.6	: Tingkat Margin Bank Syariah 2007-2009.....	96
Tabel 4.7	: Analisis Regresi Berganda	99
Tabel 4.8	: Analisis Varian (uji F).....	100
Tabel 4.9	: Analisis T test.....	101
Tabel 4.10	: Uji Moltikolinieritas.....	104
Tabel 4.11	: Uji Autokorelasi	107

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1: Perkembangan Jumlah Dana pihak Ketiga 2007-2009	4
Gambar 2.1: Penyaluran Sumber Dana	19
Gambar 2.2: <i>Cost-Push Inflation</i>	26
Gambar 2.3: <i>Demand-Pull Inflation</i>	27
Gambar 2.4: Kerangka Berfikir.....	64
Gambar 4.1: Pertumbuhan Alokasi Pembiayaan UKM 2007-2009.....	90
Gambar 4.2: Pertumbuhan Jumlah Penghimpunan Dana Pihak Ketiga.....	93
Gambar 4.3: Pertumbuhan Laju Inflasi 2007-2009.....	95
Gambar 4.4: Pertumbuhan Tingkat Margin 2007-2009	96
Gambar 4.5: Uji Normalitas Data	103
Gambar 4.6: Uji Heteroskedastisitas.....	106

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : model Summary, ANOVA, Coefficient Corelations	125
Lampiran 2: Coefficient, Durbin Watson, Collienarity Diagnostic.....	126
Lampiran 3: Residual Statistics	127
Lampiran 4: Bukti Konsultasi.....	128
Lampiran 5: Biodata Peneliti	129

ABSTRAK

Chorida, Luluk, 2010 SKRIPSI. Judul: “Pengaruh Jumlah Dana Pihak Ketiga, Inflasi, Dan Tingkat Margin Terhadap Alokasi Pembiayaan Usaha Kecil Dan Menengah (Studi Pada Bank-Bank Syariah Di Indonesia)”

Pembimbing : Indah Yuliana, SE., MM

Kata Kunci : Alokasi Pembiayaan Usaha Kecil dan Menengah (UKM), Dana Pihak Ketiga, Inflasi, dan Margin

Penggerak utama perekonomian Indonesia selama ini adalah sektor Usaha Kecil dan Menengah (UKM), kenyataan ini terlihat ketika berguncangnya krisis ekonomi tahun 1997-1998 yang melemahkan hampir semua sektor ekonomi. Saat itu, UKM mampu bertahan menghadapi guncangan dibandingkan dengan usaha besar. UKM ini juga sangat berperan dalam penyerapan tenaga kerja dan menambah jumlah unit usaha baru yang mendukung pendapatan rumah tangga dari usaha tersebut. Kendala bagi UKM untuk berkembang salah satunya adalah modal khususnya pembiayaan dari bank. Dalam hal ini bank syariah dapat menjadi solusi bagi kendala UKM. Tanpa pembiayaan UKM akan kehilangan potensi untuk tumbuh dan berkembang dikarenakan dukungan utama berdirinya UKM adalah modal atau pembiayaan UKM, jadi keduanya tidak terlepas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui beberapa faktor yang mempengaruhi, yakni dana pihak ketiga, inflasi, dan tingkat margin pembiayaan periode 2007-2009 di bank-bank syariah di Indonesia baik secara parsial, simultan maupun yang dominan berpengaruh terhadap alokasi pembiayaan UKM.

Pengujian ini dilakukan dengan metode analisis kuantitatif regresi linier berganda dengan mempertimbangkan R^2 (R Square), Uji T-test, Uji F (Varian), serta mempertimbangkan uji asumsi klasik yaitu multikolinieritas, heterokodastisitas, dan autokorelasi. Dikarenakan dengan metode tersebut dapat memberikan pengetahuan kepada kita tentang faktor-faktor yang mempengaruhi alokasi pembiayaan UKM dengan sangat jelas.

Dari hasil analisis secara simultan dengan *level of significant 5%* diketahui jumlah dana pihak ketiga, inflasi, dan tingkat margin pembiayaan mempengaruhi secara signifikan terhadap alokasi pembiayaan UKM. Ketiga variabel dalam penelitian ini mampu menjelaskan perubahan sebesar 96,9% dan sisanya 3,1% dipengaruhi oleh faktor lain diluar model. secara parsial dengan *level of significant 5%* semua ketiga variabel dependen mempengaruhi secara signifikan terhadap alokasi pembiayaan UKM kecuali tingkat margin pembiayaan, hal ini ditunjukkan oleh nilai koefisien beta sebesar -0,232, adapapun variabel yang dominan mempengaruhi alokasi pembiayaan UKM adalah jumlah dana pihak ketiga dengan nilai t hitung sebesar 16,619 yang menunjukkan nilai paling dominan daripada variabel lainnya.

ABSTRACT

Chorida, Luluk, 2010 SKRIPSI. Subtitle: Influence of amount of the third party side fund, Inflation, and margin storey level to allocation defrayal of small and medium industry (Study at Moslem law banks in Indonesia)”

Advisor : Indah Yuliana, SE., MM

Key words : Allocation defrayal of Small and Medium Industry, The Third Party Fund, Margin and Inflation.

Currently, the main growing factors in economics in Indonesia is small and medium industry sector. This fact can be seen when economic crisis occurred in 1997-1998 which weakens most of all economic sectors. Small and medium industry has a good position compared to big industries in companies. This small and medium industry also is too central in absorbtion of labour and expansion of new business unit. The problem in such industries is lack of financial support from bank. In this case, shariah bank can be solution to solve this problem. The luck of fund, the small and medium industry will lose it's potential to grow and expand. This research aims to examine some factors influencing, such as third party fund, inflation, and margin storey level in period 2007-2009 in they all shariah banks in Indonesia either through partial, simultan and also dominant have an effect on to allotted funding for small and medium industry.

This test done with quantitative analysis method with doubled linear regression by considering R² (R Square), T-Test, F Test (Variant), and also multicolinierity, heterocodasticity, and autocorrelation. This at method can examine factors influencing allocated funds considerably small and medium industry.

The result of analysis by simultan with level of significant 5% shows the amount of third party fund, inflation, and defrayal margin storey level influence by significantly to allocated fund of small and medium industry. Thare three variables in this research can explain changes about to 96,9% and the rest 3,1% influenced by other factors outside this model. In parsial model with level of significant 5% the three variables of dependent influence by significantly to allocated fund at small and medium industry except budget margin storey level. This can be seen from beta coefficient value equal to - 0,232, the most dominant variables influencing funds of small and medium industry is the amount of third party fund with value of T-value of 16,619.

المستخلص

خريدة لؤلؤ، 2010. البحث العلمي. العنوان : "تأثير مجموع عدد من الصناديق طرف ثالث، والتضخم، و نسبة الأرباح في تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة (دراسة في المصارف الإسلامية في اندونيسيا.)

المشرف : إنداه يوليانا، الماجستير

الكلمات الرئيسية : تخصيص تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة الحجم (المشاريع الصغيرة والمتوسطة)، مجموع عدد من الصناديق طرف ثالث، والتضخم، و نسبة الأرباح

البواعث الرئيسية لاقتصاد اندونيسيا هو قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم ، وهذه الحقيقة عندما ينظر زلزلة الأزمة الاقتصادية في السنة 1997 – 1998 يضعف تقريبا جميع القطاعات الاقتصادية. في ذلك الوقت، الشركات الصغيرة والمتوسطة تحمل الصدمات مقارنة مع الشركات التجارية الكبرى. الشركات الصغيرة والمتوسطة هي أيضا دور هام جدا في العمالة وزيادة كمية وحدات الأعمال الجديدة التي تعتمد على دخل الأسرة من هذه الأعمال. مشكلة أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة لتطوير واحد منهم هو رأس المال ، وهذا بالتأكيد هو صعب للغاية للحصول على قروض أو تمويل من البيت المال. في هذه الحالة المصارف الإسلامية يمكن ان يكون حلا للقيود على الشركات الصغيرة والمتوسطة. دون تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة سوف تفقد القدرة على النمو و التطور ، لأن الدعم الرئيسي لإنشاء المشاريع الصغيرة والمتوسطة هي من رأس المال أو لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بحيث لا تكون منفصلة. هذه الدراسة تهدف إلى تحديد على أشياء الذي يؤثر و هو تأثير مجموع الأموال طرف الثالث، والتضخم، و نسبة الأرباح في تمويل دور 2007 – 2009 في المصارف الإسلامية في اندونيسيا الفردية، بمجموع أو الذي بشأن توزيع النفوذ المهيمن تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

الاختبار الذي أجراه طريقة التحليل الكمي لالانحدار الخطي متعددة النظر في R^2 (R Square) ، في تجارب الاختبار T -test ، اختبار واو (فاريان) F Variant ، والنظر إلى الافتراض الكلاسيكي $multikolinieritas$ الاختبار ، $heterokodastisitas$ ، و $autokorelasi$. نتيجة هذه الأساليب يمكن أن يقدم لنا معرفة العوامل الذي يوسوس الشركات الصغيرة والمتوسطة مع توزيع واضح للغاية.

من نتائج هذا التحليل مع مستوى كبير من 5 level of significant % . علما بأن عدد من الصناديق طرف ثالث، والتضخم، ويؤثر بشكل كبير على نسبة الأرباح في تمويل تخصيص تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة. و هذه المتغيرات الثلاثة في هذه الدراسة يمكن أن تعتمد على تفسير التغيرات و النسبة الباقية 96.9 % بنسبة 3.1 % متأثرة بعوامل أخرى خارج النموذج. وعلى المستوى الجزئي كبير من 5 level of significant % من كل المتغيرات تلك الثلاثة التي تعتمد بشكل كبير يؤثر على تخصيص تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة ولكن مستوى التمويل نسبة الأرباح. هذه مسألة تعرف بعدد العروف β بنسبة -0,232 ، و مسألة المتغيرات السائدة التي تؤثر على تخصيص تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة هو عدد من صناديق طرف ثالث ، هو الذي أبداه اختبار ل 16.619 طن محسوبة مما يدل على أعلى قيمة من المتغيرات الأخرى.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Di zaman ekonomi pasar bebas yang akan di hadapi Indonesia ini memberikan dampak pada para masyarakat untuk beralih profesi sebagai wirausaha atau paling tidak mempunyai profesi sebagai Usaha Kecil dan Menengah (UKM) karena disadari bahwa pekerjaan ini memberi hidup yang layak, Permodalan bagi UKM menjadi salah satu tema pokok didalamnya untuk membentuk suatu bentuk usaha dalam merintis usaha.

Di Indonesia, salah satu keistimewaan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) terlihat ketika berguncangnya krisis ekonomi tahun 1997-1998 yang melemahkan hampir semua sektor ekonomi. Saat itu, UKM mampu bertahan menghadapi goncangan dibandingkan dengan usaha besar. UKM ini juga sangat berperan dalam penyerapan tenaga kerja dan UKM juga sangat produktif dalam menghasilkan tenaga kerja baru dan juga dapat menambah jumlah unit usaha baru yang mendukung pendapatan rumah tangga dari usaha tersebut. UKM juga memiliki fleksibilitas jika dibandingkan dengan usaha yang berkapasitas besar. (www.usaha-kecil.com)

Penggerak utama perekonomian di Indonesia selama ini pada dasarnya adalah sektor UKM. Berkaitan dengan hal ini, paling tidak terdapat beberapa fungsi utama UKM dalam menggerakkan ekonomi Indonesia, yaitu (1) Sektor usaha kecil dan menengah sebagai penyedia lapangan kerja bagi jutaan orang yang tidak

tertampung di sektor formal, (2) Sektor usaha kecil dan menengah mempunyai kontribusi terhadap pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB), dan (3) Sektor usaha kecil dan menengah sebagai sumber penghasil devisa negara melalui ekspor berbagai jenis produk yang dihasilkan sektor ini. (www.infoukm.wordpress.com)

Sebagian besar usaha bisnis di Indonesia berbentuk UKM yang memiliki karakteristik tersendiri sesuai dengan realitas perekonomian Indonesia. Usaha yang mereka jalankan mampu berdiri di sendiri dan bersifat mandiri tanpa memiliki grup atau di bawah grup perusahaan lain. Modal mereka juga terbatas dan yang pasti usahanya pun sangat susah mendapatkan pinjaman kredit atau pembiayaan dari bank, dengan kata lain termasuk kategori *unbankable*.

Berdasarkan data Usaha Kecil dan Menengah (UKM) 2006-2009 perkembangan unit usaha UKM terus mengalami peningkatan hal ini dapat dilihat dari data statistik UKM tentang jumlah unit yang berkembang tiap tahunnya di Indonesia.

Tabel 1.1

**Jumlah Unit Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Indonesia
Tahun 2006-2008**

	2006	2007	2008
Unit	509.365	536.847	559.878

Sumber: BPS data diolah

Dari Tabel diatas perkembangan unit UKM berkembang sangat baik dan hampir dalam tiap tahunnya selalu mengalami perubahan, perkembangan unit Usaha Kecil dan Menengah (UKM) tidak terlepas dari bank di Indonesia baik bank umum maupun bank syariah yang turut berperan andil dalam mendukung

perkembangan UKM, hal ini dapat dilihat dengan perkembangan alokasi UKM pada bank syariah yang khusus diperlakukan untuk UKM yang semakin lama semakin besar kucuran dana yang diberikan. (SEKI:BI)

Menurut Kasmir (2004: 29), kebutuhan akan dana ini baik diperlukan baik untuk modal investasi atau modal kerja dan dapat dilakukan pada perusahaan yang bergerak di bidang keuangan (lembaga keuangan). Dalam Praktiknya lembaga keuangan dikelompokkan dalam 2 golongan besar yaitu: Lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan lainnya, sedangkan menurut Suhardjono (2003: 46), Pada pembiayaan alokasi dana usaha kecil dan menengah (UKM) maka dapat dilakukan berbagai alternatif lembaga Pembiayaan, terdapat 3 (tiga) alternatif pembiayaan yang dapat dipilih, yaitu kredit dari perbankan, pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dan modal ventura.

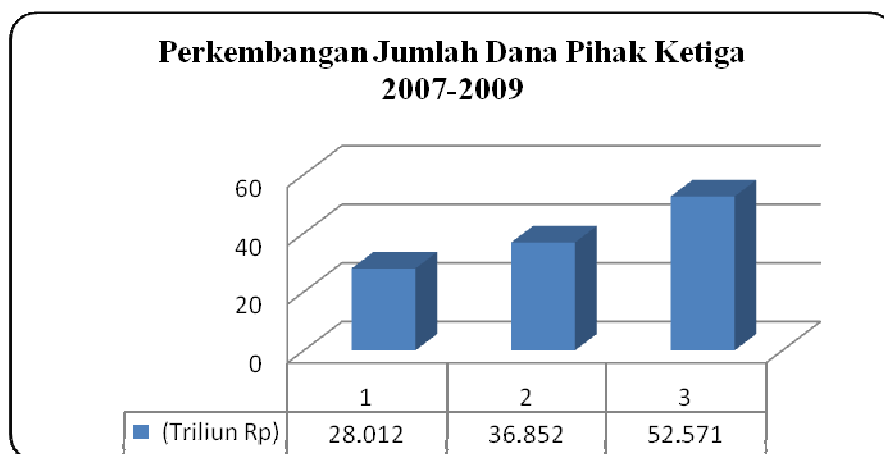
Peran ini juga tidak lepas dari perbankan syariah yang pertama kali berdiri pada tahun 1992, tercatat hingga tahun 2009 terdapat 5 (lima) Bank Umum Syariah (Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri, Bank Mega Syariah, Bank BTN Syariah, Bank Rakyat Indonesia Syariah, Bank Negara Indonesia Syariah), dan jumlah BPR Syariah sebanyak 137 buah. (www.SEKI-BI.com).

Berdasarkan bentuk pembiayaan yang ditawarkan pada bank syariah menurut Suhardjono (2003: 22-23), yaitu pembiayaan berdasarkan jual beli (*ba'i*), sewa beli (*ijarah waiqtina*), bagi hasil (*syirkah*) dan pembiayaan lainnya. Macam-macam bentuk pembiayaan yang diberikan bank-bank syariah kepada usaha kecil menjadi sangat berarti bagi berkembangnya UKM. Pembiayaan UKM diharapkan menjadi solusi bagi masalah perekonomian saat ini. Tanpa kredit atau pembiayaan

UKM akan kehilangan potensi untuk tumbuh dan berkembang dikarenakan dukungan utama berdirinya UKM adalah pembiayaan UKM, jadi keduanya tidak terlepas.

Pembiayaan yang diberlakukan untuk UKM pada bank syariah ini juga tidak lepas dari penghimpunan dana yang dilakukan bank syariah dari pihak ketiga. Menurut Heri Sudarsono (2007: 56-61) Perkembangan jumlah dana dari pihak ketiga berasal melalui sumber dana *Al-wadiah*, *Mudharabah*, *Mudharabah Mutlaqah* atau *Mudharabah Muqayyadah*. Berdasarkan data SEKI tahun 2007-2009 penghimpunan dana dari pihak ketiga dari tahun ke tahun mengalami perkembangan, hal ini dapat dilihat pada gambar 1.1

Gambar 1.1



Sumber: SEKI BI

Penghimpunan dana dari pihak ketiga sangat dibutuhkan dunia usaha dan investasi, jika orang sudah enggan menabung, maka dunia usaha dan investasi akan sulit berkembang, karena berkembangnya dunia usaha membutuhkan dana dari masyarakat. (Nurul Huda: 2008:176)

Variabel Makro baik inflasi maupun tingkat margin pembiayaan merupakan komponen penting yang harus diperhatikan setelah jumlah dana pihak ketiga. Tingkat margin pembiayaan juga mempengaruhi UKM karena semakin tinggi tingkat margin pembiayaan maka akan menimbulkan keengganan masyarakat yaitu UKM untuk meminjam dana jika tidak sebanding dengan keuntungan yang diperoleh UKM, karena tingkat margin yang diberlakukan bank syariah lazimnya menggunakan *going rate pricing*, yaitu menggunakan tingkat suku bunga pasar sebagai rujukan. (Muhammad, 2005: 137). Inflasi juga berpengaruh terhadap UKM karena jika terjadi inflasi maka bank sentral akan menaikkan bunga kemudian berdampak pada kenaikan bunga oleh bank-bank umum yang akhirnya juga berdampak pada bank syariah sehingga bunga UKM ikut naik, juga dikarenakan jika terjadi inflasi dunia usaha akan mengalami kelesuan sebab permintaan agregat akan turun.

Keadaan seperti yang dijelaskan diatas, diilhami peneliti – peneliti terdahulu dalam melakukan penelitian, diantaranya Ningrum Mulyana (2002) melakukan penelitian tentang pengaruh peningkatan pendapatan, modal usaha, jumlah tanggungan, jumlah tenaga kerja, usia, gender, dan karakter terhadap alokasi pembiayaan usaha kecil pada BMT Mitra Sarana periode 2002. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa ketujuh variabel berpengaruh simultan terhadap harga pembiayaan usaha kecil, secara parsial hanya modal usaha atau dana pihak ketiga yang berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan usaha kecil. Cokro Wahyu Sujati (2007) melakukan penelitian tentang pengaruh jumlah dana pihak ketiga, inflasi, dan margin pada bank-bank umum terhadap alokasi kredit usaha kecil

(KUK) pada bank-bank umum di Indonesia. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa jumlah dana pihak ketiga mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap alokasi KUK, tingkat inflasi mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap alokasi KUK, sedangkan pada tingkat margin pembiayaan juga mempunyai pengaruh negative dan signifikan terhadap alokasi KUK.

Dengan adanya variabel – variabel yang mempengaruhi alokasi pembiayaan usaha kecil seperti tersebut diatas, penelitian ini akan difokuskan pada pengaruh variabel jumlah dana pihak ketiga, inflasi, dan tingkat margin terhadap alokasi pembiayaan UKM yang pada bank-bank syariah di Indonesia periode 2007-2009. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan atau mempengaruhi pembiayaan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dari bank syariah layak untuk diteliti serta apakah ketentuan pembiayaan juga menjadi prioritas UKM untuk melakukan pembiayaan terhadap usahanya.

Berdasarkan kepentingan di atas Penulis berkeinginan untuk meneliti dan menganalisis pengaruh alokasi pembiayaan UKM dari bank syariah. Penelitian diharapkan dengan penelitian ini semua pihak yang terkait dan berkepentingan dengannya dapat memanfaatkan hasil yang sebesar-besarnya. Penelitian ini oleh penulis dijadikan sebagai skripsi dengan judul **“Pengaruh Jumlah Dana, Inflasi, dan Tingkat Margin Terhadap Alokasi Pembiayaan Usaha Kecil dan Menengah (Studi pada Bank-Bank Syariah di Indonesia)”**.

1.2. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah penulis kemukakan diatas, maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah jumlah dana pihak ketiga, inflasi dan tingkat margin secara simultan mempunyai pengaruh signifikan terhadap alokasi pembiayaan UKM pada bank-bank syariah di Indonesia?
2. Apakah jumlah dana pihak ketiga, inflasi, dan tingkat margin secara parsial mempunyai pengaruh signifikan terhadap alokasi pembiayaan UKM pada bank-bank syariah di Indonesia?
3. Manakah dari variabel jumlah dana pihak ketiga, inflasi dan tingkat margin yang berpengaruh dominan terhadap alokasi pembiayaan UKM pada bank-bank syariah di Indonesia?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang akan diperoleh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh signifikansi jumlah dana pihak ketiga, inflasi dan tingkat margin secara simultan terhadap alokasi pembiayaan UKM pada bank-bank syariah di Indonesia.
2. Untuk mengetahui pengaruh signifikansi dana pihak ketiga, inflasi dan tingkat margin secara parsial terhadap alokasi pembiayaan UKM pada bank-bank syariah di Indonesia.

3. Untuk mengetahui dari variabel jumlah dana pihak ketiga, inflasi dan tingkat margin yang berpengaruh dominan terhadap alokasi pembiayaan UKM pada bank-bank syariah di Indonesia.

1.4. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini, peneliti hanya akan membahas pengalokasian dana dari bank syariah yang telah terdaftar pada SEKI untuk perkembangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Indonesia. Sedangkan yang menjadi obyek data pada penelitian ini adalah

1. Laporan pada statistik SEKI (Statistik Ekonomi Keuangan Indonesia) keuangan selama 4 tahun yakni pada bulan Januari 2007 sampai dengan Desember 2009.
2. Dalam penelitian ini dibatasi pada variabel jumlah dana dari pihak ketiga, laju inflasi, dan tingkat margin (pinjaman) dan pengaruhnya yakni, jumlah pembiayaan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) sebagai variabel independen.

1.5. Manfaat Penelitian

Beberapa manfaat yang akan dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi penulis
 - a. Menerapkan ilmu yang didapat selama mengikuti kuliah.

b. Menambah wawasan bagi penulis mengenai penghimpunan dana pada bank syariah untuk mengembangkan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dengan pemberian pembiayaan pada UKM serta mengetahui faktor yang mempengaruhi akan alokasi pembiayaan yang dihimpun bank syariah.

2. Bagi bank syariah

a. Manfaat bagi bank syariah adalah untuk sumber referensi dan informasi bagaimana membuat kebijakan yang berkaitan dengan alokasi UKM serta strategi peningkatan UKM.

3. Bagi pemerintah dan masyarakat

a. Manfaat bagi pemerintah dan masyarakat adalah untuk informasi bagaimana pemerintah dan masyarakat dapat meningkatkan sektor usaha Kecil dan Menengah (UKM) serta berguna bagi pembandingan bagi penelitian yang serupa.

4. Bagi jurusan ekonomi

a. Manfaat bagi jurusan manajemen ekonomi yakni sebagai tambahan dan perbandingan dalam penelitian selanjutnya.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Ada penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya tentang UMKM, penelitian tersebut adalah:

1. Ningrum Mulyana (2002) “Pengaruh Pembiayaan Produktif Terhadap Peningkatan dan Pengembangan Usaha Kecil (Studi pada Pedagang Kecil di Pasar Induk Gadang Malang)”

Penelitian tersebut ditulis dengan tema usaha kecil yang terdapat pada pasar Induk Gadang Malang. Tentang penyaluran dana usaha kecil pada BMT “Mitra Sarana” Malang yang dilakukan pada tahun 2002. *Variabel dependen* dalam penelitian tersebut adalah Pembiayaan Usaha Kecil di BMT “Mitra Sarana”, sedangkan variabel independen penelitian tersebut yaitu modal usaha, jumlah tanggungan, jumlah tenaga kerja, dan usia pedagang dengan Menggunakan OLS dengan mencari tahu hubungan variabel independen tersebut terhadap variabel dependennya. Dalam penelitian tersebut juga menganalisis hubungan peningkatan usaha kecil setelah menggunakan jasa pembiayaan pada BMT “Mitra Sarana”

Penelitian tersebut kemudian menghasilkan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- a. Dengan metode yang digunakan diketahui bahwa pemberian pembiayaan produktif memiliki pengaruh signifikan terhadap peningkatan pendapatan pedagang kecil dengan persamaan:

$$X = 591687 + 0,0584 X_1 - 19909 X_2 - 56010 X_3 - 464,74 X_4 - 7834,6 X_5 + 33724 X_6 + 64187 X_7$$

Dimana : X_1 = Peningkatan Pendapatan X_5 = Usia
 X_2 = Modal Usaha X_6 = Gender
 X_3 = Jumlah Tanggungan X_7 = Karakter
 X_4 = Jumlah Tenaga Kerja

- b. Secara simultan tujuh variabel diatas secara signifikan berpengaruh terhadap variabel terikat (peningkatan pendapatan) sebesar 14,239 satuan.
- c. Pembiayaan produktif tersebut terbukti mampu meningkatkan pendapatan usaha kecil yang diwakili oleh besarnya jumlah modal usaha dan berdasarkan hasil responden hampir 80% menyatakan bahwa pembiayaan yang relatif kecil, mempermudah mereka untuk melunasinya.

2. Cokro Wahyu Sejati (2004) “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Alokasi KUK Pada Bank-Bank Umum di Indonesia (Pada tahun 2004:02-2005:12)”

Penelitian tersebut ditulis dengan tema KUK dan UKM, tentang penyaluran KUK di Indonesia yang dilakukan dengan sampel yang diambil

tahun 2004 sampai tahun 2007. *Variabel dependen* dalam penelitian tersebut adalah alokasi KUK di Indonesia, sedangkan variabel independen penelitian tersebut yaitu jumlah dana yang dihimpun bank, Tingkat suku bunga. Menggunakan OLS dengan mencari tahu hubungan *variabel independen* tersebut terhadap variabel dependennya. Dalam penelitian tersebut juga menganalisis hubungan antara inflasi dengan tingkat suku bunga deposito.

Penelitian tersebut kemudian menghasilkan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- a. Variabel independen Jumlah dana yang dihimpun bank berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel dependen alokasi KUK
- b. Pada tingkat suku bunga deposito ternyata variabel inflasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap volume alokasi kredit usaha kecil (KUK)
- c. Tingkat laju Inflasi di Indonesia ternyata berpengaruh negatif dan signifikan terhadap volume alokasi kredit usaha kecil (KUK)

Dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh ningrum muliyana dengan menggunakan variabel-variabel yang pernah diteliti oleh ningrum yaitu peningkatan pendapatan, modal usaha, jumlah tanggungan, jumlah tenaga kerja, usia, gender, dan karakter peminjam, maka Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu:

- a. Variabel-variabel yang dipilih dalam penelitian ini yaitu peningkatan pendapatan, jumlah tanggungan, jumlah tenaga kerja, usia, gender, dan karakter peminjam.

b. Objek penelitian dalam penelitian ini yaitu Baitul Maal Wattamwil (BMT) Mitra Sarana Malang.

c. Periode yang digunakan yaitu 2002.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu digunakannya variabel terikat yang sama yaitu alokasi pembiayaan Usaha Kecil dan metode analisis yang digunakan yaitu regresi linear berganda dengan asumsi uji multikolinearitas, autokorelasi, dan heterokodestisitas.

Sedangkan penelitian dari cokro wahyu sujati menggunakan variabel-variabel yang pernah diteliti oleh cokro yaitu jumlah dana pihak ketiga, inflasi, tingkat suku bunga bank umum yang mempengaruhi alokasi Kredit usaha kecil (KUK), maka Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu:

a. Variabel terikat yang tidak sama yaitu alokasi pembiayaan Usaha Kecil dan Menengah (UKM)

b. Objek penelitian dalam penelitian ini yaitu Bank-Bank Syariah di Indonesia.

c. Periode yang digunakan yaitu 2004-2007.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu digunakannya variabel bebas yang sama yaitu jumlah dana pihak ketiga, inflasi, tingkat margin pembiayaan pada bank syariah dan metode analisis yang digunakan yaitu regresi linear berganda dengan asumsi uji normalitas, multikolinearitas, autokorelasi, dan heterokodestisitas.

Dengan mengadakan penelitian yang serupa tetapi pada area yang berbeda yakni bank syariah diharapkan dapat melihat perbedaan serta memperbaharui informasi tentang penyaluran pembiayaan kredit usaha kecil dan menengah pada bank syariah, karena pada saat ini bank syariah yang melayani nasabah dengan macam-macam bentuk akad pembiayaan dapat menjadi pilihan masyarakat atas macam-macam pembiayaan bank syariah termasuk kebutuhan pembiayaan masyarakat usaha kecil.

No	Judul Penelitian	Tujuan	Variabel	Metode penyusunan data	Alat Analisis	Data yang digunakan dalam penelitian	Hasil
1	Ningrum Mulyana (2002) UIN Malang “Pengaruh Pembiayaan Produktif Terhadap Peningkatan dan Pengembangan Usaha Kecil” (Studi pada Pedagang Kecil di Pasar Induk Gadang Malang	<p>Untuk mengetahui besarnya pengaruh pemberian pembiayaan produktif di BMT dalam meningkatkan pendapatan dan pengembangan usaha kecil selain pembiayaan produktif</p> <p>Untuk mengetahui faktor-faktor lain yang juga mampu meningkatkan pendapatan dan pengembangan usaha kecil selain pembiayaan produktif</p>	<p>Variable bebas (<i>Independent variable</i>) X = Pembiayaan Produktif</p> <p>Variable terikat (<i>Dependent variable</i>) = hubungan yang mempengaruhi, Meliputi: X1=Pendapatan usaha X2=Modal usaha X3=Jumlah Tanggungan X4=Jumlah Tenaga Kerja X5=Usia X6=Gender X7=Karakter Anggota</p>	Analisis data dengan persamaan regresi linier berganda	<p>Metode Kuosioner</p> <p>Metode <i>Interview</i></p> <p>Metode dokumentasi</p> <p>Metode Observasi</p>	Data Primer Data Sekunder	<p>Secara simultan tujuh variabel diatas secara signifikan berpengaruh terhadap variabel terikat (peningkatan pendapatan) sebesar 14,239 satuan</p> <p>Pembiayaan produktif tersebut terbukti mampu meningkatkan pendapatan usaha kecil yang diwakili oleh besarnya jumlah modal usaha dan berdasarkan hasil responden hampir 80% menyatakan bahwa pembiayaan yang relatif kecil, mempermudah mereka untuk melunasinya.</p>

2	Cokro Wahyu Sujati (2004) UIIS Yogyakarta “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Alokasi KUK Pada Bank-Bank Umum di Indonesia (Pada tahun 2004:02-2007:12)”	<p>Untuk mengetahui apakah jumlah dana yang dihimpun oleh bank-bank umum di Indonesia berpengaruh positif dan signifikan terhadap alokasi KUK pada bank-bank umum di Indonesia.</p> <p>Untuk mengetahui apakah tingkat suku bunga riil kredit (pinjaman) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap alokasi KUK pada bank-bank umum di Indonesia</p> <p>Untuk mengetahui apakah tingkat laju inflasi di Indonesia berpengaruh negatif dan signifikan terhadap alokasi KUK pada bank-bank umum di Indonesia.</p>	<p>Y= Kredit Usaha Kecil (KUK) (Triliun Rp)</p> <p>X1= Jumlah Dana Pihak Ketiga (Triliun Rp)</p> <p>X2=Inflasi(%)</p> <p>X3=Suku Bunga Riil Pinjaman (%)</p>	Analisis kuantitatif deskriptif	Himpunan statistik dari SEKI (Statistik Ekonomi Keuangan Indonesia)	Data Sekunder	<p>Variabel independen Jumlah dana yang dihimpun bank berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel dependen alokasi KUK</p> <p>Pada tingkat suku bunga deposito ternyata variabel inflasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap volume alokasi kredit usaha kecil (KUK)</p> <p>Tingkat laju Inflasi di Indonesia ternyata berpengaruh negatif dan signifikan terhadap volume alokasi kredit usaha kecil (KUK)</p>
---	--	--	--	---------------------------------	---	---------------	---

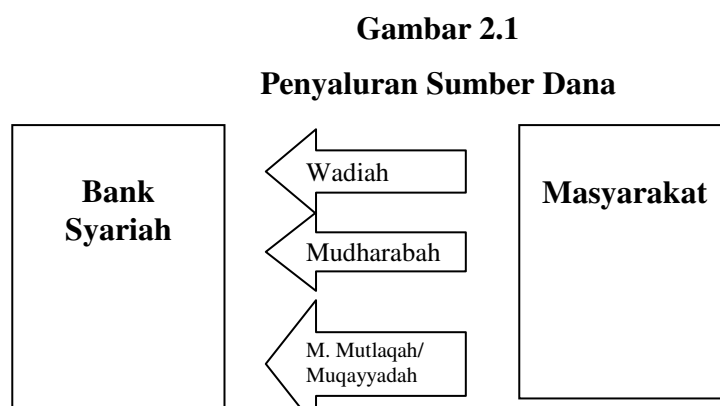
3	<p>Luluk Chorida (2009) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang “Pengaruh Jumlah Dana, Inflasi, Margin terhadap Pembiayaan UKM (Studi pada Bank-Bank Syariah di Indonesia”</p>	<p>Untuk mengetahui pengaruh signifikansi jumlah dana pihak ketiga, inflasi dan tingkat margin secara bersama-sama terhadap alokasi pembiayaan UKM pada bank-bank syariah di Indonesia</p> <p>Untuk mengetahui pengaruh signifikansi dana pihak ketiga, inflasi dan tingkat margin secara individu terhadap alokasi pembiayaan UKM pada bank-bank syariah di Indonesia</p> <p>Untuk mengetahui manakah dari variabel jumlah dana pihak ketiga, inflasi dan tingkat margin yang berpengaruh dominan terhadap alokasi</p>	<p>Y= Pembiayaan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) (Triliun Rp).</p> <p>X1= Jumlah Dana Pihak Ketiga (Triliun Rp)</p> <p>X2= Inflasi (%)</p> <p>X3= Tingkat Margin Pinjaman (%)</p>	<p>Analisis kuantitatif deskriptif</p>	<p>Himpunan Statistik dari SEKI (Statistik Keuangan Ekonomi Indonesia)</p>	<p>Data Sekunder</p>	<p>Secara bersama-sama variabel jumlah dana pihak ketiga, inflasi dan tingkat margin mempunyai pengaruh signifikan dengan kontribusi 96,9% terhadap alokasi pembiayaan UKM pada bank-bank syariah di Indonesia.</p> <p>Secara simultan terdapat pengaruh signifikansi dana pihak ketiga, inflasi dan tingkat margin terhadap alokasi pembiayaan UKM pada bank-bank syariah di Indonesia</p> <p>Dari ketiga variabel independent (jumlah dana pihak ketiga, inflasi, tingkat margin) yang mempunyai pengaruh dominan terhadap variabel dependen (Pembiayaan UKM) adalah Alokasi dana pihak ketiga dengan nilai statistik t hitung sebesar 16,619.</p>
---	---	---	--	--	--	----------------------	--

		pembiayaan UKM pada bank-bank syariah di Indonesia						
--	--	--	--	--	--	--	--	--

2.2. Landasan Teori

2.2.1. Pengertian Sumber dana

Sumber dana bank syariah dapat diperoleh dari empat sumber, yaitu modal, titipan, investasi, dan investasi khusus. Secara sederhana, sumber dana bank syariah dapat digambarkan sebagai berikut:



Sumber: Heri Sudarsono, 2005

1. Al-wadiah

Al-wadiah dalam segi bahasa dapat diartikan sebagai meninggalkan atau meletakkan, atau meletakkan sesuatu pada orang lain untuk dipelihara dan dijaga. Dari aspek teknis, wadiah dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip kehendaki, landasan hukum juga tertera dalam firman Allah:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا

Artinya:

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. (QS. An-nisaa: 58)

Teknis perbankan

- 1) Prinsip yang diterapkan adalah *wadiah yad dhammah* yang diterapkan pada produk rekening giro.
- 2) *Wadiah dhammah* berbeda dengan *wadiah amanah*. Dalam *wadiah amanah*, pada prinsipnya harta titipan tidak boleh dimanfaatkan oleh yang dititipi.
- 3) Sedangkan dalam *wadiah dhammah* pihak yang dititipi (bank) bertanggung jawab atas keutuhan harta titipan sehingga ia boleh memanfaatkan harta titipan tersebut.
- 4) Karena *wadiah* yang diterapkan dalam produk giro perbankan ini juga disifati dengan *yad dhammah*, maka implikasi hukumnya sama dengan *qardh*, dimana nasabah bertindak sebagai yang meminjamkan uang, dan bank bertindak sebagai yang dipinjami.

2. Investasi

a. *Al-Mudharabah*

Dalam mengaplikasikan *mudharabah*, penyimpan atau deposan bertindak sebagai *shahibul maal* (pemilik modal) dan bank sebagai *mudharib* (pengelola). Dana tersebut digunakan bank untuk melakukan pembiayaan *mudharabah* atau *ijarah* seperti yang telah dijelaskan terdahulu. Dapat pula dana tersebut digunakan bank untuk melakukan pembiayaan

mudharabah. Hasil usaha ini dibagikan berdasarkan nisbah yang disepakati. Bila bank menggunakannya untuk melakukan pembiayaan *mudharabah*, maka bank bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi.

b. *Al-Mudharabah Mutlaqah*

Penerapan *Al-Mudharabah Mutlaqah* dapat berupa tabungan dan deposito sehingga terdapat dua jenis himpunan dana yaitu tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah*. Berdasarkan prinsip ini tidak ada pembatasan bagi bank dalam menggunakan dana yang dihimpun

Teknik perbankan

- 1) Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan dan atau pembagian keuntungan secara risiko yang dapat ditimbulkan dari penyimpanan dana. Apabila telah tercapai kesepakatan maka hal tersebut harus dicantumkan dalam *akad*.
- 2) Untuk tabungan *mudharabah*, bank dapat memberikan buku tabungan sebagai bukti penyimpanan, serta kartu ATM dan atau alat penarikan lainnya kepada penabung. Untuk deposito *mudharabah*, bank wajib memberikan sertifikat atau tanda penyimpanan (*bilyet*) deposito kepada deponan.
- 3) Tabungan *mudharabah* dapat diambil setiap saat oleh penabung sesuai dengan perjanjian yang disepakati, namun tidak diperkenankan mengalami saldo negatif.

- 4) Deposito *mudharabah* hanya dapat dicairkan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati, 1,3,6,12 bulan. Deposito yang diperpanjang, setelah jatuh tempo akan diperlakukan sama seperti deposito baru, tetapi nilai pada *akad* sudah tercantum perpanjangan otomatis maka tidak perlu dibuat *akad* baru.
- 5) Ketentuan-ketentuan yang lain yang berkaitan dengan tabungan dan deposito tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

3. Investasi khusus

a. *Al-Mudharabah Muqayyadah on Balance Sheet*

Jenis *Mudharabah* ini merupakan simpanan khusus (*restricted investment*) dimana pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank. Misalnya, disyaratkan digunakan untuk bisnis tertentu, atau disyaratkan digunakan dengan *akad* tertentu, atau disyaratkan digunakan untuk nasabah tertentu.

Teknis perbankan

- 1) Pemilik dana wajib menetapkan syarat tertentu yang harus diikuti oleh bank, dan bank wajib membuat *akad* yang mengatur persyaratan penyaluran dana simpanan khusus
- 2) Wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan dan atau pembagian keuntungan secara risiko yang dapat ditimbulkan dari penyimpanan dana. Apabila

telah tercapai kesepakatan maka hal tersebut harus dicantumkan dalam *akad*.

- 3) Sebagai tanda bukti simpanan bank menerbitkan bukti simpanan khusus, bank wajib menisbahkan dana dari rekening lainnya.
- 4) Untuk deposito *mudharabah*, bank wajib memberikan sertifikat atau tanda penyimpanan (*bilyet*) deposito kepada deposan.

b. *Al-Mudharabah Muqayyadah off Balance Sheet*

Jenis *mudharabah* ini merupakan penyaluran dana mudharabah langsung kepada pelaksana usahanya, dimana bank bertindak sebagai perantara (*arranger*) yang mempertemukan antara pemilik dana dengan pelaksana usaha. Pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank dalam mencari kegiatan usaha yang akan dibiayai dan pelaksanaan usahanya.

Teknik Perbankan

- 1) Sebagai tanda bukti simpanan bank menerbitkan bukti simpanan khusus. Bank wajib memisahkan dana dari rekening lainnya. Simpanan khusus dicatat pada porsi tersendiri dalam rekening administrasi.
- 2) Dana simpanan khusus harus disalurkan secara langsung kepada pihak yang diamanatkan oleh pemilik dana

- 3) Bank menerima komisi atas jasa mempertemukan kedua pihak. Sedangkan antara pemilik dana dan pelaksana usaha berlaku *nisbah* bagi hasil. (Heri Sudarsono, 2007: 56-61)

Kegiatan bank yang kedua setelah menghimpun dana dari masyarakat luas dalam bentuk modal, titipan, investasi dan investasi khusus adalah menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkannya. Kegiatan penyaluran dana ini dikenal dengan istilah alokasi dana. Pengalokasian dana dapat diwujudkan dalam bentuk pinjaman atau lebih dikenal dengan kredit atau pada bank syariah (pembiayaan). Pengalokasian dana dapat diwujudkan dalam bentuk pinjaman atau lebih dikenal dengan kredit. Pengalokasian dana dapat pula dilakukan dengan membelikan berbagai aset yang dianggap menguntungkan bank.

Arti lain dari alokasi dana adalah menjual kembali dana yang yang diperoleh dari penghimpunan dana dalam bentuk simpanan. Penjualan dana ini tidak lain agar perbankan dapat memperoleh keuntungan seoptimal mungkin. (Kasmir, 2004: 91)

2.2.2. Inflasi

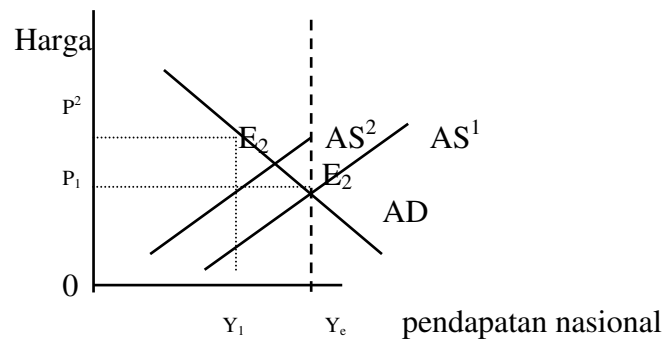
Dalam banyak literatur disebutkan bahwa inflasi didefinisikan sebagai kenaikan harga umum secara terus menerus dari suatu perekonomian. Sedangkan menurut Sukirno (2004:33), inflasi yaitu, kenaikan dalam harga barang dan jasa, yang terjadi karena permintaan bertambah lebih besar

dibandingkan dengan penawaran harga di pasar. Namun penyebab inflasi di Indonesia umumnya dipengaruhi oleh dua macam, yaitu inflasi yang diimpor dan defisit dalam Anggaran Pemerintah Belanja Negara (APBN). Penyebab inflasi lainnya menurut Sudono Sukirno adalah kenaikan harga-harga barang yang diimpor, penambahan penawaran uang yang berlebihan tanpa diikuti oleh pertambahan produksi dan penawaran barang, serta terjadinya kekacauan politik dan ekonomi sebagai akibat pemerintahan yang kurang bertanggung jawab. Adapun penyebab lain dari inflasi antara lain uang yang beredar lebih besar dari pada jumlah barang yang beredar, sehingga permintaan akan mengalami kenaikan, maka dengan sendirinya produsen akan menaikkan harga barang dan apabila kondisi seperti ini dibiarkan maka akan terjadi inflasi.

Menurut ilmu ekonomi modern, terdapat dua jenis inflasi yang berbeda satu sama lain, yaitu inflasi karena dorongan biaya (*Cost-Push Inflation*) dan inflasi karena meningkatnya permintaan (*Demand-Pull Inflation*)

1. *Cost-Push Inflation* (inflasi desakan ongkos)

Yaitu, inflasi yang disebabkan karena peningkatan harga akibat naiknya biaya-biaya. Apabila permintaan terhadap bahan baku melebihi penawarannya, maka harga akan naik. Karena para pabrikan membayar lebih mahal atas bahan baku mereka dan menetapkan harga produk akhir yang lebih tinggi kepada pedagang dan pedagang menaikkan harga barang itu, yang kemudian akan ditanggung oleh para konsumen.

Gambar 2.2***Cost-Push Inflation***

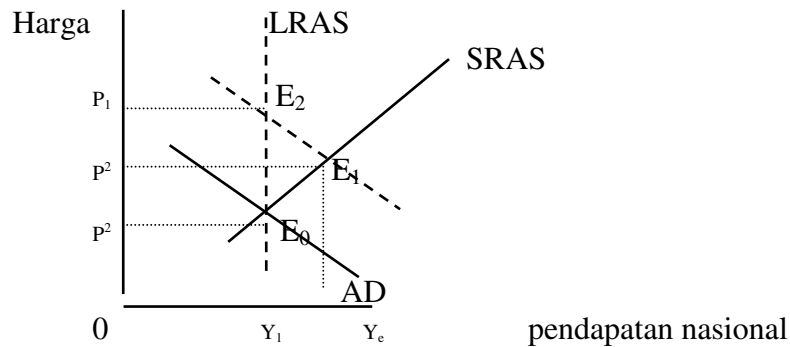
Diasumsikan keseimbangan ekonomi mula-mula terjadi pada titik E_1 dengan permintaan agregat AD dan penawaran agregat AS^1 . Misalkan buruh menuntut kenaikan upah. Akibatnya kurva AS bergeser ke kiri dari AS^1 menjadi AS^2 . Tingkat harga naik dari P_1 menjadi P_2 dan *output* turun dari Y_e menjadi Y_1 dengan keseimbangan baru tercapai pada titik E_2 . Lihat juga *Cost-Push Inflation*

2. *Demand-Pull Inflation* (inflasi karena tarikan permintaan)

Yaitu, kenaikan harga-harga yang terjadi akibat kenaikan permintaan agregat (AD) yang lebih besar dari penawaran agregat (AS). Artinya, inflasi terjadi apabila pendapatan nasional lebih besar dari pendapatan potensial. Dalam bentuk grafis, inflasi karena tarikan permintaan ini bisa digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.3

Demand-Pull Inflation



Asumsikan permintaan agregat bertambah, sehingga kurva AD bergeser ke kanan menjadi AD^1 . Akibatnya tingkat harga dan *output* naik di sepanjang kurva SRAS, masing-masing dari P_0 menjadi P_1 dan dari Y_e menjadi Y_1 . Dalam jangka panjang, pendapatan nasional akan kembali menuju tingkat keseimbangan yang menunjukkan *full employment* (Y_e). Akibatnya, tingkat harga naik menjadi P_1 dan keseimbangan baru tercapai pada titik E_2 . Lihat juga *Cost-Push Inflation*.

Inflasi atau kenaikan harga-harga yang tinggi dan terus menerus telah menimbulkan beberapa dampak buruk kepada individu dan masyarakat, para penabung, kreditor/debitor dan produsen, ataupun pada kegiatan perekonomian secara keseluruhan. Dampak inflasi terhadap individu dan masyarakat menurut Prathama Rahardja dan Manurung (2004:169), misalnya:

1. Menurunnya tingkat kesejahteraan masyarakat

Inflasi menyebabkan daya beli masyarakat menjadi berkurang atau malah semakin rendah, apalagi bagi orang-orang yang berpendapatan tetap, kenaikan upah tidak secepat kenaikan harga-harga, maka inflasi ini akan menurunkan upah riil setiap individu yang berpendapatan tetap.

2. Memperburuk distribusi pendapatan

Bagi masyarakat yang berpendapatan tetap akan menghadapi kemerosotan nilai riil dari pendapatannya dan pemilik kekayaan dalam bentuk uang akan mengalami penurunan juga. Akan tetapi, bagi pemilik kekayaan tetap seperti tanah atau bangunan dapat mempertahankan atau justru menambah nilai riil kekayaannya. Dengan demikian inflasi akan menyebabkan pembagian pendapatan diantara golongan yang berpendapatan tetap dengan para pemilik kekayaan tetap akan semakin menjadi tidak merata.

Dampak lain dirasakan pula oleh para penabung, oleh kreditur atau debitur, dan oleh produsen. Dampak inflasi bagi para penabung ini menyebabkan orang enggan untuk menabung karena nilai mata uang semakin menurun. Tabungan memang menghasilkan bunga, tetapi jika tingkat inflasi diatas bunga, tetap saja nilai mata uang akan menurun. Bila orang sudah enggan menabung, maka dunia usaha dan investasikan sulit untuk berkembang, karena berkembangnya dunia usaha membutuhkan dana dari masyarakat yang disimpan di bank.

Adapun dampak inflasi bagi debitur atau yang meminjamkan uang kepada bank, inflasi ini justru menguntungkan karena pada saat pembayaran utang kepada kreditur, nilai uang lebih rendah dibanding pada saat meminjam, tetapi

sebaliknya bagi kreditur atau pihak yang meminjamkan uang akan mengalami kerugian karena nilai pengembalian lebih rendah dibandingkan saat peminjaman. Begitu pun bagi produsen, inflasi bisa menguntungkan bila pendapatan yang diperoleh lebih tinggi daripada kenaikan biaya produksi. Bila hal ini terjadi, produsen akan terdorong untuk melipatgandakan produksinya. Namun, bila inflasi menyebabkan naiknya biaya produksi hingga pada akhirnya merugikan produsen, maka produsen enggan untuk meneruskan produksinya.

Sedangkan dampak inflasi bagi perekonomian secara keseluruhan, misalnya prospek pembangunan ekonomi jangka panjang akan semakin memburuk, inflasi mengganggu stabilitas ekonomi dengan merusak rencana jangka panjang para pelaku ekonomi. Inflasi jika tidak cepat ditangani, maka akan susah untuk dikendalikan, inflasi cenderung akan bertambah cepat. Dampak inflasi bagi perekonomian nasional diantaranya. (*Wikipedia Indonesia, Enksiklopedia bebas berbahasa Indonesia*)

- a. Investasi berkurang
- b. Mendorong tingkat bunga
- c. Mendorong penanam modal yang bersifat spekulatif
- d. Menimbulkan kegagalan pelaksanaan pembangunan
- e. Menimbulkan ketidakpastian keadaan ekonomi dimasa yang akan datang
- f. Menyebabkan daya saing produk nasional berkurang
- g. Menimbulkan defisit neraca pembayaran
- h. Merosotnya tingkat kehidupan dan kesejahteraan masyarakat, dan
- i. Meningkatnya jumlah pengangguran. (Nurul Huda, 2008:175-177)

2.2.3. Inflasi dalam Prespektif Islam

Dalam islam tidak dikenal dengan inflasi, karena mata uang yang dipakai adalah dinar dan dirham, yang mana mempunyai nilai yang stabil. Adhiwarman Karim mengatakan bahwa, Syekh An-Nabhani (2001: 147) memberikan beberapa alasan mengapa mata uang yang sesuai itu adalah dengan menggunakan emas dan perak, padahal harta itu mencakup semua barang yang bisa dijadikan sebagai kekayaan

1. Islam telah mengaitkan emas dan perak dengan hukum yang baku dan tidak berubah-ubah, ketika Islam mewajibkan mewajibkan diat, maka yang dijadikan sebagai ukrannya adalah dalam bentuk emas.
2. Rasulullah telah menetapkan emas dan perak sebagai mata uang dan beliau menjadikan hanya emas dan perak sebagai standar uang.
3. Ketika Allah SWT mewajibkan zakat uang, Allah telah mewajibkan zakat uang, Allah telah menetapkan zakat tersebut dengan nisab emas dan perak.
4. Hukum-hukum tentang pertukaran mata uang yang terjadi dalam transaksi uang hanya dilakukan dengan emas dan perak, begitu pun dengan transaksi lainnya hanya dinyatakan dengan emas dan perak.

Penurunan nilai dinar atau dirham memang masih mungkin terjadi, yaitu ketika nilai emas yang menopang nilai nominal dinar itu mengalami penurunan. Diantaranya akibat ditemukannya emas dalam jumlah yang besar, tapi keadaan ini kecil sekali kemungkinannya.

Kondisi defisit pernah terjadi pada zaman Rasulullah dan ini hanya terjadi satu kali yaitu sebelum perang Hunain. Walaupun demikian, Al-Maqrizi membagi inflasi ke dalam dua macam, yaitu inflasi akibat berkurangnya persediaan barang dan inflasi akibat kesalahan manusia. Inflasi jenis pertama inilah yang pernah terjadi pada zaman Rasulullah dan *Khulafaur Rasyidin*, yaitu karena kekeringan atau karena peperangan. Inflasi karena kesalahan manusia ini disebabkan oleh tiga hal, yaitu korupsi dan administrasi yang buruk, pajak yang memberatkan, serta jumlah uang yang berlebihan. Kenaikan harga-harga yang terjadi adalah dalam bentuk jumlah uangnya, bila dalam bentuk dinar jarang sekali terjadi kenaikan. Al-Maqrizi mengatakan supaya uang dibatasi hanya pada tingkat minimal yang dibutuhkan untuk transaksi pecahan yang kecil saja.

2.2.4. Pembiayaan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Berdasarkan Prinsip Syariah

Dalam menyalurkan dana kepada Usaha Kecil dan Menengah (UKM), secara garis besar terdapat 4 (empat) kelompok prinsip pembiayaan yang dilakukan oleh bank syariah, yaitu prinsip jual beli (*ba'i*), sewa beli (*ijarah waiqtina*), bagi hasil (*syirkah*). (Suhardjono, 2003: 47-50)

1. Pembiayaan dengan prinsip jual beli (*ba'i*). Untuk jenis pembiayaan dengan prinsip ini meliputi: (Muhammad, 2005: 22-23)

- a. Pembiayaan *ba'i al-Murabahah*

Pembiayaan *Murabahah* adalah perjanjian jual-beli antara bank dan nasabah di mana bank syariah membeli barang yang diperlukan oleh

nasabah dan kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin/keuntungan yang disepakati antara bank syariah dan nasabah.

Landasan hukum dalam ayat Al-Qur'an, (Heri sudarsono, 2007: 62)

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya:

Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba' (QS. Al-Baqoroh: 275)

b. Pembiayaan *ba'i as-Salam*

Pembiayaan *Salam* adalah perjanjian jual beli barang dengan cara pemesanan dengan syarat-syarat tertentu dan pembayaran harga terlebih dahulu.

Terdapat persyariatan *salam* dalam sebuah ayat Al-Qur'an:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. (QS. Al-Baqoroh: 282)

Dalam sebuah hadits juga diriwayatkan:

قل ابن عباس: اشهدان السلف المضمون الى اجل مسمى قد
احله الله افى كتابه و ادن فيه ثم قرا الاية السابقة

Ibnu Abbas berkata, “Saya bersaksi bahwa jual beli secara ijon yang jangka waktunya ditentukan sampai waktu tertentu, benar-benar telah dihalalkan Allah dalam Kitab-Nya, dan padanya Dia membolehkannya. “Kemudian ia membaca ayat di atas”. (Al-Wajiz, 2007:693)

c. Pembiayaan *Istishna*

Pembiayaan *Istishna* adalah perjanjian jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan dan penjual.

2. Pembiayaan dengan prinsip sewa beli (*Ijarah Waiqtina/Ijarah Muntahiya Bittamlik*)

Pembiayaan dengan prinsip sewa beli (*Ijarah Waiqtina/Ijarah Muntahiya Bittamlik*) Adalah akad sewa menyewa suatu barang antara bank dengan nasabah dimana nasabah diberi kesempatan untuk membeli obyek sewa pada akhir akad atau dalam dunia usaha dikenal dengan *finance lease*. Harga sewa dan harga beli ditetapkan bersama di awal perjanjian.

Landasan hukum dalam ayat Al-Qur'an, (Heri sudarsono, 2007: 66)

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا
آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya:

Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Baqoroh: 233)

3. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil (*Syirkah*). Untuk jenis pembiayaan dengan prinsip ini meliputi *al-Musyarakah*, *Mudharabah mutlaqah*, dan *Mudharabah Muqayyadah*: (Suhardjono, 2003: 48)

a. Pembiayaan *Musyarakah*

Pembiayaan *Musyarakah* adalah pembiayaan di antara para pemilik dana/modal untuk mencampurkan dana/modal mereka pada suatu usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan di antara para pemilik dana/modal berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.

Dalam buku Heri Sudarsono, (2007:67), *Musyarakah* ada dua jenis, yaitu *Musyarakah* pemilikan dan *Musyarakah* akad (kontrak). *Musyarakah* pemilikan tercipta karena warisan wasiat atau kondisi lainnya yang berakibat pemilikan satu aset oleh dua orang atau lebih setuju bahwa tiap orang dari mereka memberikan modal *musyarakah* dan berbagi keuntungan dan kerugian.

Hal ini dijelaskan dalam surat Al-Maidah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا
يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ
وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi orang-orang yang selalu adil (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi yang adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat dengan takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Maidah: 8)

Dalam hadits riwayat Abu Dawud , disebutkan:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمِصْبِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الزُّبَيْرِ قَانَ
عَنْ أَبِي حَيَّانَ التَّمِيمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ قَالَ إِنَّ اللَّهَ
يَقُولُ أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَ
خَرَجْتُ مِنْ بَيْنَهُمَا

“Dari Abu Hurairah, Rasulullah Saw bersabda, “Sesungguhnya Allah azza wa jalla berfirman, ‘Aku pihak dari ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satunya tidak mengkhianati lainnya” (HR. Abu Dawud: 2936)

Dari hadits di atas dapat di ketahui bahwasanya adanya perintah untuk membangun kepercayaan atas rekan kerja. Kita bisa mengetahui bahwa Allah SAW akan memberkahi orang yang bekerjasama ketika keduanya saling percaya tidak ada kebohongan atau berkhianat atas kesepakatan yang akan disetujui oleh keduanya. Hal ini menunjukkan kecintaan Allah SAW

kepada hamba-hambanya yang melakukan kerjasama selama saling menjunjung tinggi amanat kerja sama dan menjauhi pengkhianatan. (Ilfi Nur, 2008: 149-150)

b. Pembiayaan *Mudharabah Mutlaqah*

Pembiayaan *Mudharabah Mutlaqah* adalah perjanjian antara penanam dana dan pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya

Dalam buku karya (Suhrawardi, 2004: 51) *Mudharabah* sendiri dalam agama Islam berasal dari *adh-dharbu fil ardhi*, yaitu melakukan pekerjaan untuk berniaga. Allah berfirman:

وَأَخْرُونَ يُضْرَبُونَ فِي الْأَرْضِ يَتَّبِعُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

Artinya:

Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah. (QS.Muzzammil: 20)

Dalam Sunnah diriwayatkan,

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ ثَابِتٍ الْبَزَّازُ حَدَّثَنَا
نَصْرُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ دَاوُدَ عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ

عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ فِيهِنَّ
الْبُرْكََةُ الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَأَخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا
لِلْبَيْعِ

“Dari Suaib ar-Rumi ra bahwa Rasulullah Saw bersabda, “Tiga hal yang di dalam terdapat keberkahan: jual-beli secara tangguh, muqharadah (mudharabah) dan mencampur tangan dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual”. (HR. Ibnu Majah: 2280)

Dalam kitab Al-Wajiz (2007:689) *Mudharabah* disebut juga *qiradh*, berasal dari kata berarti *qath* (sepotong), karena pemilik modal mengambil sebagian dari hartanya untuk diperdagangkan dan ia berhak mendapatkan sebagian dari keuntungan.

Menurut istilah fiqih, kata *mudharabah* adalah akad perjanjian antara kedua belah pihak, yang salah satu dari keduanya memberi modal kepada yang lain supaya dikembangkan, sedangkan keuntungannya dibagi antara keduanya sesuai dengan ketentuan yang disepakati.

c. Pembiayaan *Mudharabah Muqayyadah*

Pembiayaan *Mudharabah Muqayyadah* adalah pada dasarnya hampir sama dengan prinsip *Mudhrabah Mutlaqah*. Perbedaannya adalah penyediaan modal dibatasi penggunaannya untuk kegiatan tertentu dan dengan syarat yang sepenuhnya ditetapkan oleh bank. (Suhardjono, 2003: 49)

Adapun perbedaan bunga dan bagi hasil dapat dijelaskan lebih jauh dalam tabel berikut: (Syafi'ie Antonio, 2001: 49)

Tabel 2.2
Perbedaan Antara Bunga dan Bagi Hasil

Bunga	Bagi Hasil
a. Penentuan bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi harus selalu untung.	a. Penentuan besarnya resiko/nisab bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi.
b. Besarnya presentase berdasarkan pada jumlah uang (modal) yang dipinjamkan.	b. Besarnya rasio bagi-hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh.
c. Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan apakah proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi.	c. Bagi-hasil bergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan. Bila usaha merugi, kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak.
d. Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun jumlah keuntungan berlipat atau keadaan ekonomi sedang <i>booming</i> .	d. Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan.
e. Eksistensi bunga diragukan (kalau tidak dikecam) oleh semua agama termasuk Islam.	e. Tidak ada yang meragukan keabsahan bagi hasil.

Sumber: Syafi'ie Antonio, 2001

4. Pembiayaan lainnya. Untuk jenis pembiayaan ini diklasifikasikan dengan pembiayaan: (Suhardjono, 2003: 49-50)

a. Pembiayaan *Qardh*

Adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharap imbalan. Dalam literature *fiqh* klasik, *qardh* dikategorikan dalam akad *tathwawwu* atau saling membantu dan bukan transaksi komersial.

Dalam Landasan hukum Al-Qur'an: (Heri Sudarsono, 2007: 74)

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

Artinya:

Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak. (QS. al-Hadid: 11)

Adapun kewajiban orang yang berhutang adalah segera membayarnya, nabi bersabda: (Ilfi Nur, 2008: 160)

حَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ الْعُثْمَانِيُّ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ
عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ

“Rasullullah Saw bersabda, “Ruh seorang mukmin tergantung pada hutangnya sampai ia membayarnya.” (HR. Ibnu Majah: 2404)

(Matan lain: Ahmad 9302, Darimi 247)

b. Pembiayaan *Al-Hawalah* (anjak piutang)

Pembiayaan *Al-Hawalah* adalah pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada pihak lain dalam hal-hal yang diwakilkan. Hal ini bertujuan untuk membantu *supplier* mendapatkan modal tunai agar dapat melanjutkan

produksinya. Bank mendapatkan imbalan (*fee*) atas jasa pemindahan piutang tersebut.

Dalam hadits diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا
سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزُّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ وَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ
فَلْيَتَّبِعْ

“Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Saw bersabda, “Menunda pembayaran bagi orang yang mampu adalah suatu kezaliman. Dan jika salah seorang dari kamu diikutkan (dihawalah-kan) kepada orang yang mampu/kaya, terimalah hawalah ini” (HR. Imam Bukhari dan Muslim: 2924)

(Matan lain: Turmudzi 1229, Nasa’i 4609. Abi Daud 2903, Ibnu Majah 2394, Ahmad 7034, Malik 1181, Darimi 2473)

c. Pembiayaan *Rahn* (Gadai)

Pembiayaan *Rahn* adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya.

Landasan hukum dalam Al-Qur’an, yakni:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ

Artinya:

Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). (QS. Al-Baqoroh: 283)

Juga disebutkan dalam Hadits,

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنِ الْأَعْمَشِ
عَنْ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنِي الْأَسْوَدُ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ اشْتَرَى مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا إِلَىٰ أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعَهُ

“Aisyah ra berkata bahwa Rasulullah Saw membeli makan dari seorang Yahudi dan menjamin kepadanya baju besi.” (HR. Ibnu Majah 2427)

(Matan lain: Muslim 3007-3009, Nasa'i 4503, Ibnu Majah 2427, Ahmad 23017)

2.2.5. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan atau *financing*, yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah

pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.

1. Prinsip Pembiayaan

a. Prinsip Keadilan

Prinsip ini tercermin dari penerapan imbalan atas dasar bagi hasil dan pengambilan margin keuntungan yang disepakati bersama antara bank dengan nasabah.

b. Prinsip Kesederajatan

Bank syariah menempatkan nasabah penyimpan dana, nasabah pengguna dana, maupun bank pada kedudukan yang sama dan sederajat. Hal ini tercermin dalam hak, kewajiban, risiko, dan keuntungan yang berimbang antara nasabah penyimpan dana, nasabah pengguna dana, maupun bank.

c. Prinsip Ketentraman

Produk-produk bank syariah telah sesuai dengan prinsip dan kaidah muamalah Islam, antara lain tidak adanya unsur riba serta penerapan zakat harta. Dengan demikian, nasabah akan merasakan ketentraman lahir maupun batin.

2. Tujuan Pembiayaan

Secara umum tujuan pembiayaan dibedakan menjadi dua kelompok yaitu: tujuan pembiayaan untuk tingkat makro, dan tujuan pembiayaan untuk tingkat mikro. Secara makro pembiayaan bertujuan untuk:

- a. Peningkatan ekonomi umat, artinya: masyarakat yang tidak dapat akses secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan mereka dapat melakukan akses ekonomi. Dengan demikian dapat meningkatkan taraf ekonominya.
- b. Tersedianya dana bagi peningkatan usaha, artinya: untuk pengembangan usaha membutuhkan dana tambahan. Dana tambahan ini dapat diperoleh dengan melakukan aktivitas pembiayaan. Pihak yang *surplus* dana menyalurkan kepada pihak *minus* dana, sehingga dana dapat tergulirkan.
- c. Meningkatkan produktivitas, artinya: adanya pembiayaan memberikan peluang bagi masyarakat usaha dengan mampu meningkatkan daya produksinya. Sebab upaya produksi tidak akan dapat jalan tanpa adanya dana.
- d. Membuka lapangan kerja baru, artinya: dengan dibukanya sektor-sektor usaha melalui penambahan dana pembiayaan, maka sektor usaha tersebut akan menyerap tenaga kerja. Hal ini berarti membuka atau menambah lapangan kerja baru.
- e. Terjadi distribusi pendapatan, artinya: masyarakat usaha produktif mampu melakukan aktivitas kerja, berarti mereka memperoleh pendapatan dari hasil usahanya. Penghasilan merupakan bagian dari pendapatan masyarakat. Jika ini terjadi maka akan terdistribusi pendapatan.

Adapun secara mikro, pembiayaan diberikan dalam rangka untuk:

- a. Upaya memaksimalkan laba, artinya: setiap usaha yang dibuka memiliki tujuan tertinggi, yaitu menghasilkan laba usaha. Setiap usaha menginginkan mampu mencapai laba maksimal, untuk dapat menghasilkan laba maksimal maka mereka perlu dukungan dana yang cukup.
- b. Upaya meminimalkan risiko, artinya: usaha yang dilakukan agar mampu menghasilkan laba maksimal, maka pengusaha harus mampu meminimalkan laba risiko yang mungkin timbul. Risiko kekurangan modal usaha dapat diperoleh melalui tindakan pembiayaan.
- c. Pendayagunaan sumber ekonomi, artinya sumberdaya ekonomi dapat dikembangkan dengan melakukan *mixing* antara sumberdaya alam dengan sumber daya manusia serta sumberdaya modal. Jika sumberdaya alam dan sumberdaya manusianya ada, dan sumberdaya modal tidak ada. Maka dipastikan diperlukan pembiayaan. Dengan demikian, pembiayaan pada dasarnya dapat meningkatkan daya guna sumber-sumber daya ekonomi.
- d. Penyaluran kelebihan dana, artinya: dalam kehidupan masyarakat ini ada pihak yang memiliki kelebihan sementara ada pihak yang kekurangan. Dalam kaitannya dengan masalah dana, maka mekanisme pembiayaan dapat menjadi jembatan dalam penyeimbangan dana dari pihak yang kelebihan dana dari pihak yang kelebihan (*surplus*) kepada pihak yang kekurangan (*minus*) dana. (Muhammad, 2005: 16-18)

3. Jenis-jenis Pembiayaan

Sesuai dengan akad pengembangan produk, maka bank syariah memiliki banyak jenis pembiayaan. Adapun jenis produk/jasa pembiayaan dapat dikelompokkan menurut beberapa aspek, diantaranya:

a. Pembiayaan menurut tujuan

- 1) Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan yang dimaksudkan untuk mendapatkan modal dalam rangka pengembangan usaha.
- 2) Pembiayaan investasi, yaitu pembiayaan yang dimaksudkan untuk melakukan investasi atau pengadaan barang konsumtif.

b. Pembiayaan menurut jangka waktu

- 1) Pembiayaan jangka waktu pendek, pembiayaan yang dilakukan dengan waktu 1 bulan sampai dengan 1 tahun.
- 2) Pembiayaan jangka waktu menengah, pembiayaan yang dilakukan dengan waktu 1 tahun sampai dengan 5 tahun.
- 3) Pembiayaan jangka waktu panjang, pembiayaan yang dilakukan dengan waktu lebih dari 5 tahun. (Muhammad, 2005: 22)

2.2.6. Pendekatan Pembiayaan

Pada buku karya Muhammad (2005: 39-43) perjanjian pembiayaan di bank syariah pada dasarnya melibatkan empat hal, yaitu: (1) Bank sebagai pemberi pembiayaan, (2) Nasabah sebagai pihak penerima pembiayaan, (3) Obyek yang dituju untuk dibiayai, dan (4) Jaminan yang diberikan oleh nasabah kepada

bank. Perjanjian ini dipengaruhi oleh pendekatan yang akan ditempuh oleh bank syariah yang bersangkutan.

Pendekatan ini tampaknya dapat dijadikan rujukan untuk menyusun perencanaan pemberian pembiayaan di bank syariah. Pendekatan yang dimaksud adalah:

1. Pendekatan perencanaan pembiayaan berdasarkan sumber dana oleh bank secara rasional.

Sebagai kegiatan pokok suatu bank yaitu di satu pihak mengumpulkan dan kemudian menyalurkan dana tersebut dalam bentuk pembiayaan. Oleh karena itu kemampuan bank dalam menyalurkan pembiayaan ke masyarakat akan sangat tergantung dari sumber-sumber dana yang dapat dikuasainya. Sumber-sumber dana tersebut masing-masing memiliki karakteristik sendiri-sendiri. Di samping kemampuan untuk mendapatkan dana dari masing-masing sumber yang akan terbatas pula.

Dari dana yang dapat dikumpulkan oleh suatu bank dari berbagai sumber, ternyata tidak seluruhnya dapat dipasarkan dalam bentuk pembiayaan, karena untuk menjaga likuiditas bank yang bersangkutan perlu *reserve* (cadangan) baik berupa uang tunai, surat surat berharga yang mudah dilikuidasi, atau cadangan pada rekening bank sentral

Dengan demikian masalah perencanaan pembiayaan melalui pendekatan sumber antara lain:

- a. Berapa volume dana yang dapat dikumpulkan.
- b. Berapa volume dana yang dapat disalurkan.

c. Dari mana sumber dana tersebut.

Secara skematis sumber dana bank syari'ah dapat dilihat dari tabel 2.2:

Tabel 2.3
Sumber Dana di Bank Syari'ah

Ekstern		Intern	
Pemilik	Utang	Cadangan	Insentif
Donasi pemilik Saham biasa Saham Preferen Dan lain-lain	Giro Deposito <i>Travellers Check</i> Tabungan Giro Bank Lain Setoran Jaminan Kreditur Umum Dan lain-lain	Cadangan Umum Cadangan Khusus Cadangan Debitur Laba Ditahan Dan lain-lain	Penjualan <i>fixed asset</i> yang tak terpakai Likuidasi barang jaminan Penagihan debitur Dan lain-lain

Sumber : Muhammad, 2005

2. Pendekatan perencanaan pembiayaan berdasarkan kemampuan pasar untuk menyerap penawaran dana dalam bentuk pembiayaan.

Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam perencanaan pembiayaan berdasarkan pendekatan pasar adalah:

- a. Corak pemasarannya (*market profile*), baik ditinjau dari "*Economic Environment*" yang dapat diketahui dari berbagai indikator ekonomi, juga ditinjau dari "*Cultural Environment*" maupun "*Regulatory Environment*"
- b. Corak persaingan (*competition profile*), berapa banyak volume pembiayaan yang telah dipasarkan ke masyarakat dan berapa besar masing-masing bank pesaing merebut "*market share*". *Financial product* apa saja yang dijual dan bagaimana *pricing*-nya, dll.
- c. Corak nasabah (*customer profile*), apakah perusahaan milik pemerintah, atau swasta, atau dari kelompok pengusaha ekonomi lemah. Pemahaman

atas corak nasabah ini akan sangat bermanfaat dalam menerapkan sasaran pemasaran yang akan dilakukan.

- d. Corak produk (*product profile*) yang telah dan akan dipasarkan. Berapa persen jenis pembiayaan itu dapat disediakan dibanding dengan seluruh jenis pembiayaan perbankan, dan seberapa besar daya serap pasar (yang dibutuhkan nasabah).

2.2.7. Resiko Pembiayaan Bermasalah

Resiko yang terjadi dari peminjaman yang tertunda atau ketidakmampuan peminjam untuk membayar kewajiban yang telah dibebankan, untuk mengantisipasi hal tersebut maka bank syariah harus menganalisis penyebab permasalahannya. Analisis dan penyelesaian pembiayaan bermasalah di bank syariah dapat dilakukan dengan langkah-langkah berikut:

1. Analisis sebab kemacetan. Analisis sebab-sebab kemacetan pembiayaan dapat dilakukan pada aspek internal dan eksternal berikut:
 - a. Aspek Intenal
 - 1) Peminjam kurang cakap dalam usaha tersebut
 - 2) Manajemen tidak baik atau kurang rapi
 - 3) Laporan keuangan tidak lengkap
 - 4) Penggunaan dana yang tidak sesuai dengan perencanaan
 - 5) Perencanaan yang kurang matang
 - 6) Dana yang diberikan tidak cukup untuk menjalankan usaha tersebut

b. Aspek Eksternal

- 1) Aspek pasar kurang mendukung
- 2) Kemampuan daya beli masyarakat kurang
- 3) Kebijakan pemerintah
- 4) Pengaruh lain di luar usaha
- 5) Kenakalan peminjam

2. Menggali Potensi Peminjam

Anggota yang mengalami kemacetan dalam memenuhi kewajiban harus dimotivasi untuk memulai kembali atau membenahi dan mengantisipasi penyebab kemacetan usaha atau angsuran. Untuk itu perlu digali potensi yang ada pada peminjam agar dana yang telah digunakan lebih efektif digunakan.

Hal-hal yang perlu diperhatikan:

- a. Adakah peminjam memiliki kecakapan lain?
- b. Adakah peminjam memiliki usaha lainnya?
- c. Adakah penghasilan lain peminjam?

3. Melakukan perbaikan akad (*remedial*)

4. Memberikan pinjaman ulang, mungkin dalam bentuk pembiayaan *al-*

Qardhul Hasan: Murabahah: Mudharabah

5. Penundaan Pembayaran

6. *Reschuduling* (memperkecil angsuran dengan memperpanjang waktu atau akad dan margin baru)

7. Memperkecil margin keuntungan atau bagi hasil. (Muhammad, 2005: 168-169)

2.2.8. Pengertian Usaha Kecil dan Menengah

Mengacu kepada Undang-Undang No 9 Tahun 1995 dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 3/9 Bkr tahun 2001.

1. Kriteria Usaha Kecil adalah, sebagai berikut:
 - a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha), atau
 - b. Memiliki hasil penjualan bersih tahunan paling banyak Rp 1.000.000.000,- per tahun
 - c. Milik warga Negara Indonesia
 - d. Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau besar.
 - e. Berbentuk usaha orang perseorangan, badan usaha yang berbadan hukum termasuk koperasi. (Suhardjono, 2003: 53)

Sedangkan Usaha Menengah sebagaimana dimaksud Inpres No.10 tahun 1998 adalah:

- a. Usaha bersifat produktif yang memenuhi kriteria kekayaan usaha bersih lebih besar dari Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak sebesar Rp10.000.000.000,00, (sepuluh milyar rupiah)

- b. Tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha serta dapat menerima kredit dari bank sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) s/d Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

Sedangkan Biro Pusat Statistik (BPS) mendefinisikan skala usaha berdasarkan jumlah pekerja. UK adalah perusahaan (baik yang berbadan hukum atau tidak) yang mempunyai 5-19 orang termasuk pemilik usaha atau pengusaha, dan UM adalah usaha antara 20-99 orang, dan perusahaan dengan jumlah lebih 99 orang dikategorikan sebagai UB. (Tulus, 2003: 307-308)

2. Karakteristik Usaha Kecil (UK) adalah:

- a. Jenis barang/komoditi yang diusahakan umumnya sudah tetap tidak gampang berubah
- b. Lokasi/tempat usaha umumnya sudah menetap tidak berpindah-pindah
- c. Pada umumnya sudah melakukan administrasi keuangan walau masih sederhana, keuangan perusahaan sudah mulai dipisahkan dengan keuangan keluarga, sudah membuat neraca usaha
- d. Sudah memiliki izin usaha dan persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP
- e. Sumberdaya manusia (pengusaha) memiliki pengalaman dalam berwirausaha
- f. Sebagian sudah akses ke perbankan dalam hal keperluan modal
- g. Sebagian besar belum dapat membuat manajemen usaha dengan baik seperti *business planning*.

Sedangkan karakteristik Usaha Menengah (UM), yakni:

- a. Pada umumnya telah memiliki manajemen dan organisasi yang lebih baik, lebih teratur bahkan lebih modern, dengan pembagian tugas yang jelas antara lain, bagian keuangan, bagian pemasaran dan bagian produksi;
- b. Telah melakukan manajemen keuangan dengan menerapkan sistem akuntansi dengan teratur, sehingga memudahkan untuk auditing dan penilaian atau pemeriksaan termasuk oleh perbankan
- c. Telah melakukan aturan atau pengelolaan dan organisasi perburuhan, telah ada Jamsostek, pemeliharaan kesehatan dll;
- d. Sudah memiliki segala persyaratan legalitas antara lain izin tetangga, izin usaha, izin tempat, NPWP, upaya pengelolaan lingkungan dll;
- e. Sudah akses kepada sumber-sumber pendanaan perbankan;
- f. Pada umumnya telah memiliki sumber daya manusia yang terlatih dan terdidik. (<http://hanieffeui.wordpress.com>)

3. Jenis Usaha Kecil dan Menengah (UKM)

Jenis usaha kecil dan menengah dikategorikan berdasarkan jenis produk atau jasa yang dihasilkan, maupun aktivitas yang dilakukan oleh suatu usaha kecil, serta mengacu pada kriteria UKM menurut KADIN, juga kriteria dari Bank Indonesia (BI), yaitu:

a. Usaha perdagangan

Terdiri dari keagenan yaitu: agen koran dan majalah, sepatu, pakaian dan lain-lain. Pengecer yaitu: minyak, sembako, buah-buahan. Ekspor/impor: berbagai produk lokal dan internasional. Sektor informal: pengumpulan barang bekas, kaki lima dan lain-lain.

b. Usaha pertanian

Terdiri dari pertanian pangan maupun perkebunan: bibit dan peralatan pertanian, buah-buahan dan lain-lain. Perikanan darat/laut: tambak udang, pembuatan krupuk ikan dan produk lain dari hasil perikanan dan laut. Peternakan dan usaha lain yang termasuk lingkup pengawasan department. Pertanian: produsen telur ayam, susu sapi, dan lain-lain produk hasil peternakan.

c. Usaha Industri

Terdiri dari industri logam/kimia: pengrajin logam, kulit, keramik, *fiberglass*, marmer dan lain-lain. Industri makanan/minuman: makanan tradisional, minuman ringan, *catering*, produk lainnya. Pertambangan: galian. Aneka industri kecil: pengrajin perhiasan, ukiran batu dan lain-lain. Konveksi: produsen *garment*, batik, tenun-ikat, dan lain-lain.

d. Usaha Jasa

Terdiri dari konsultan: hukum, pajak, manajemen. Perencana: perencana teknis, perencana sistem. Perbengkelan: bengkel mobil, elektronik, jam. Transportasi: travel, taksi, angkutan umum. Restoran: rumah makan, *coffe shop*, *cafetarian*, dan lain-lain.

e. Usaha Jasa konstruksi

Terdiri dari kontraktor bangunan, jalan, kelistrikan, jembatan, pengairan dan usaha-usaha lain yang berkaitan dengan teknis konstruksi bangunan.

(Harimurti, 2001: 3-6)

2.2.9. Penyebab kegagalan Pembiayaan UKM

Mudrajat Kuncoro menyebutkan dalam penelitiannya menyatakan bahwa ada beberapa kendala dalam pengembangan UMK di Indonesia, diantaranya :

1. Adanya Pungutan Liar (PUNGLI) mulai dari proses perizinan sampai pengadaan barang dan ekspor barang tersebut. (Kuncoro et.al. 2004, Survey di Batam, Jabotabek, Bandung, Jepara, Surabaya, Bali)
2. Kebijakan makro pemerintahan yang kurang mendukung.
3. Permasalahan kredit lama dan bunga tinggi dari perbankan dan lembaga keuangan lainnya. (Mudrajad, 2007)

Agunan P. Samosir, dalam studi kasusnya menjelaskan tentang hambatan ekspor produksi UM. Adapun beberapa faktor penghambat diantaranya :

1. Faktor Internal
 - a. Kurang likuiditas (tambahan modal)
 - b. Naiknya upah
2. Faktor eksternal
 - a. Melemahnya nilai tukar rupiah
 - b. Kurangnya akses informasi pasar dalam dan luar negeri

- c. Turunnya daya beli masyarakat, sebagai akibat dari turunnya pendapatan riil masyarakat.
- d. Menurunnya permintaan pasar
- e. Kenaikan harga bahan baku
- f. Kurangnya dukungan pemerintah kepada UMK yang berorientasi pada ekspor.
- g. Tingginya pungutan

2.2.10. Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dalam Prespektif Islam

Dalam Islam telah dikatakan bahwa siapa saja yang mau berusaha untuk berhasil entah itu umat kecil atau umat yang besar jika ia bersungguh-sungguh melakukannya maka Allah akan senantiasa memberikan yang terbaik baginya. sama juga dengan pedagang kecil meski mereka memiliki banyak kekurangan salah satunya mengenai modal usaha meningkatkan dan mengembangkan usahanya tetapi dengan usaha yang sungguh-sungguh dan memanfaatkan apa saja yang mereka miliki asal tidak bertentangan dengan ajaran agama pasti Allah akan memberikan yang terbaik bagi mereka, hal ini termaktub dalam ayat Al-Qur'an surat Al-Mulk ayat 15:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ

Artinya:

Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, Maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezki-Nya. dan Hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan. (QS. Al-Mulk: 15)

Dalam buku karya Suhrawardi (2004:49), juga menjelaskan tentang ayat yang memerintahkan untuk melakukan aktivitas yang produktif bagi pemenuhan kehidupan manusia itu diakhiri dengan ayat:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ
وَادْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya:

Apabila Telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. (QS. Al-Jumu'ah: 10)

Misbahul Munir (2007: 117-123) dalam bukunya Ajaran-ajaran Ekonomi Rasulullah, terdapat sebuah hadis riwayat Thabrani disebutkan:

عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان
الله يحب العبد المحترف

Dari Ibn Umar bahwasanya Nabi Saw bersabda: "Sesungguhnya Allah SWT menyukai seorang hamba mukmin yang berketrampilan" (HR. Thabrani).

Dalam hadis ini Rasulullah Saw, menjelaskan bahwa ajaran Islam mendorong umatnya untuk bekerja, terutama dengan cara berwirausaha, karena orang mukmin yang bekerja dan berwirausaha akan dicintai oleh Allah SWT.

Islam juga mengajarkan bahwa tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah sebagaimana yang diterangkan dalam sebuah hadis. Seseorang yang bekerja sendiri, tidak di bawah suruhan orang lain, adalah orang-orang yang meletakkan tangannya di atas. Sebaliknya seseorang yang bekerja sebagai buruh, pegawai atau yang serupa, adalah orang yang meletakkan tangannya di bawah. Karena ia minta kepada orang lain untuk diberi pekerjaan atau tunduk kepada pemerintah orang yang dipertuannya. Biasanya orang yang demikian pendapatannya ditentukan oleh orang lain.

Jika suatu Negara jumlah penduduknya lebih banyak yang berwirausaha, daripada yang jadi pegawai, buruh atau karyawan, maka kemakmuran negeri itu lebih cepat tercapai. Karena orang yang berwirausaha lebih banyak yang berlaku produktif daripada konsumtif. Maka amat tepat dan bijaksana, bahwa islam menganjurkan kepada setiap penganutnya, agar berwirausaha sesuai dengan keahlian setiap orang. Manfaat atau keuntungan dari sifat kewirausahaan ini adalah jiwa merdeka dan berani menghadapi risiko yang tidak terduga-duga. Bahkan dalam sebuah riwayat disebutkan:

عليكم بالتجارة فإِنَّ فِيهَا تِسْعَةَ عَشَرَ الرِّزْقِ

"Berdaganglah, karena sembilan dari sepuluh pintu rizki itu berasal dari wirausaha (perdagangan)". (Hadis Mursal)

Riwayat di atas mengandung arti bahwa dari sekian banyak rizki Allah SWT, yang diberika kepada manusia di dunia, 90% di antaranya diberikan melalui cara perdagangan, sedangkan sisanya yang hanya 10% diperebutkan

oleh sekian banyak manusia mulai dari pegawai negeri, pegawai swasta, karyawan, buruh, petani dll.

Dalam buku karya Suhrawardi (2004:3) Berdasarkan kepada uraian yang dikemukakan diatas, aktivitas ekonomi dalam pandangan Islam bertujuan untuk:

1. Memenuhi kebutuhan hidup seseorang secara sederhana
2. Memenuhi kebutuhan keluarga
3. Memenuhi kebutuhan jangka panjang
4. Menyediakan kebutuhan keluarga yang ditinggalkan
5. Memberikan bantuan sosial dan sumbangan menurut jalan Allah.

2.2.11. Pengertian Bank Syariah

Definisi bank dapat dikemukakan dari beberapa pengertian dibawah ini yaitu:

Bank Syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank Islam atau biasa disebut dengan bank tanpa bunga, adalah lembaga keuangan/perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadist Nabi Saw. Dengan kata lain, bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam. (Muhammad, 2005: 1)

Pengertian bank syariah dalam buku karya Dahlan Siamat (2002:12), menyebutkan bank syariah adalah bank umum sebagaimana dimaksud dalam

UU No. 7 tahun 1992 tentang perbankan yang saat ini telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, termasuk unit usaha syariah dan kantor cabang bank asing yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.

1. Fungsi dan peran bank syariah

Fungsi dan peran bank syariah yang diantaranya tercantum dalam pembukaan standar akuntansi yang dikeluarkan oleh AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution*), sebagai berikut:

- a. Manajer investasi, bank syariah dapat mengelola investasi dana nasabah.
- b. Investor, bank syariah dapat menginvestasikan dana yang dimilikinya maupun dana nasabah yang dipercayakan kepadanya.
- c. Penyedia jasa keuangan dan dan lalu lintas pembayaran, bank syariah dapat melakukan kegiatan-kegiatan jasa layanan perbankan sebagaimana lazimnya.
- d. Pelaksanaan kegiatan sosial, sebagai ciri yang melekat pada entitas keuangan syariah, bank Islam juga memiliki kewajiban untuk mengeluarkan dan mengelola (menghimpun, mendistribusikan, dan mengadministrasikan) zakat serta dana-dana sosial lainnya. (Heri Sudarsono, 2007: 39-40)

2. Tujuan Bank Syariah

Bank Syariah mempunyai beberapa tujuan di antaranya sebagai berikut:

- a. Mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk ber-muamalat secara Islam, khususnya muamalat yang berhubungan dengan perbankan, agar terhindar dari praktek-praktek riba atau jenis-jenis usaha/perdagangan lain yang mengandung unsur *gharar* (tipuan), di mana jenis usaha tersebut selain dilarang dalam Islam, juga telah menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan ekonomi rakyat.
- b. Untuk menciptakan suatu keadilan di bidang ekonomi dengan jalan meratakan pendapatan melalui kegiatan investasi, agar tidak terjadi kesenjangan yang amat besar antara pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan dana.
- c. Untuk meningkatkan kualitas hidup umat dengan jalan membuka peluang usaha yang lebih besar terutama kelompok miskin, yang diarahkan kepada kegiatan usaha yang produktif, menuju terciptanya kemandirian usaha.
- d. Untuk menanggulangi masalah kemiskinan, yang pada umumnya merupakan program utama dari Negara-negara yang sedang berkembang.
- e. Untuk menjaga stabilitas ekonomi dan meneter. Dengan aktivitas ekonomi bank syariah akan mampu menghindari pemanasan ekonomi di akibatkan adanya inflasi, menghindari persaingan yang tidak sehat antar lembaga keuangan.
- f. Untuk menyelamatkan ketergantungan umat Islam terhadap bank non-syariah. (Heri Sudarsono, 2007: 40)

3. Ciri-ciri bank syariah

Bank syariah mempunyai ciri-ciri berbeda dengan bank konvensional, adapun ciri-ciri bank syariah adalah:

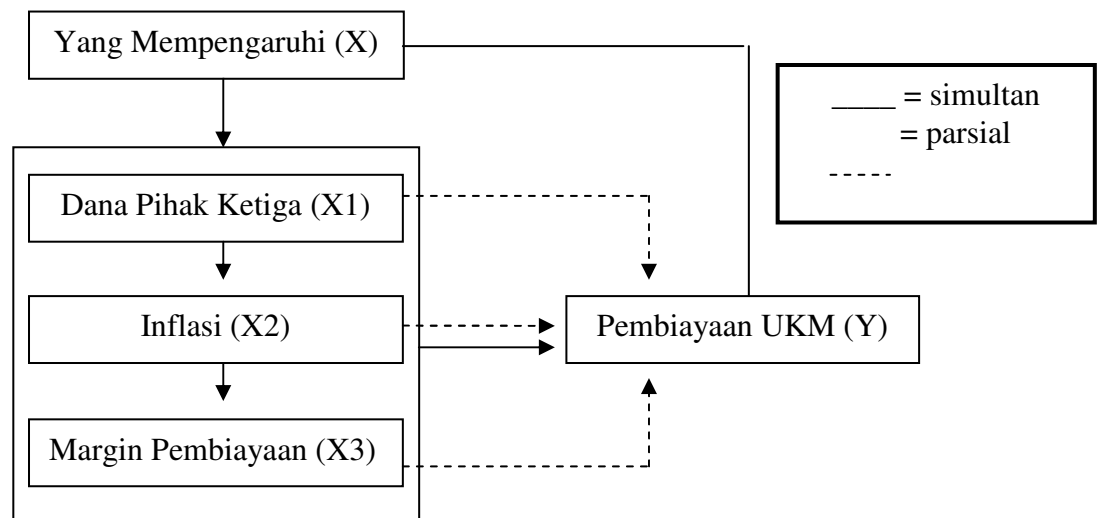
- a. Beban biaya yang disepakati bersama pada waktu akad perjanjian diwujudkan dalam bentuk jumlah nominal, yang besarnya tidak kaku dan dapat dilakukan dengan kebebasan untuk tawar-menawar dalam batas wajar. Beban biaya tersebut hanya dikenakan sampai batas waktu sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak.
- b. Penggunaan presentase dalam hal kewajiban untuk melakukan pembayaran selalu dihindari, karena presentase bersifat melekat pada sisa utang meskipun batas waktu perjanjian telah berakhir.
- c. Di dalam kontrak-kontrak pembiayaan proyek, bank syariah tidak menerapkan perhitungan berdasarkan keuntungan yang pasti yang ditetapkan di muka, karena pada hakikatnya yang mengetahui tentang ruginya suatu yang proyek yang dibiayai bank hanyalah Allah semata.
- d. Pengerahan dana masyarakat dalam bentuk deposito tabungan oleh penyimpan dianggap sebagai titipan (*al-wadiah*) sedangkan bagi bank dianggap sebagai titipan yang diamanatkan sebagai penyertaan dana pada proyek-proyek yang dibiayai bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah sehingga pada penyimpan tidak dijanjikan imbalan yang pasti.
- e. Dewan Pengawas Syariah (DPS) bertugas untuk mengawasi operasionalisasi bank dari sudut syariahnya. Selain itu manajer dan pimpinan bank Islam harus menguasai dasar-dasar *muamalah* Islam.

f. Fungsi kelembagaan bank syariah selain menjembatani antara pihak pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan dana, juga mempunyai fungsi khusus yaitu fungsi amanah, artinya berkewajiban menjaga dan bertanggung jawab atas keamanan dana yang disimpan dan siap sewaktu-waktu apabila dana diambil pemiliknya. (Heri Sudarsono, 2007: 41)

2.3. Kerangka Berfikir

Gambar 2.4

Kerangka Berfikir



2.4. Hipotesis Penelitian

Dari penjelasan teori diatas maka dapat diambil beberapa hipotesis sebagai berikut ini:

1. Diduga variabel jumlah dana pihak ketiga, inflasi, dan tingkat margin secara simultan mempunyai pengaruh signifikan terhadap alokasi pembiayaan UKM pada bank-bank syariah di Indonesia
2. Diduga variabel jumlah dana pihak ketiga, inflasi, dan tingkat margin secara parsial mempunyai pengaruh signifikan terhadap alokasi pembiayaan UKM pada bank-bank syariah di Indonesia
3. Diduga jumlah dana pihak ketiga sebagai variabel independen yang paling dominan mempengaruhi alokasi pembiayaan UKM pada bank-bank syariah di Indonesia.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.2. Lokasi Penelitian

Data penelitian diambil dari himpunan statistik dari SEKI (Statistik Ekonomi Keuangan Indonesia) yang dapat diperoleh dari Bank Indonesia dan internet. Diambil juga dari berbagai situs dan website yang merupakan sumber rujukan data untuk relevansi penelitian.

3.2. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang peneliti gunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian statistik dengan pendekatan deskriptif.

Statistik Deskriptif dalam penelitian pada dasarnya merupakan proses transformasi data penelitian dalam bentuk tabulasi sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan. Ukuran yang digunakan dalam deskripsi antara lain berupa: frekuensi, tendensi sentral (*mean, median, modus*), dispersi, (*deviasi standard an varian*) dan koefisien korelasi antar variabel penelitian. (Indriantoro, dkk., 1999: 170)

Seperti telah dijelaskan pada penelitian ini bahwa subjek penelitiannya adalah alokasi pembiayaan usaha kecil dan menengah pada bank syariah, maka data juga diambil sesuai penelitian tersebut. Data dependen dari penelitian tersebut adalah UKM (Usaha Kecil dan Menengah) data independennya adalah

prosentase margin pinjaman bank syariah, jumlah dana yang dihimpun bank dari dana pihak ketiga, dan tingkat laju inflasi.

3.2. Populasi Dan Sampel

3.3.1. Populasi

Semua instrumen bank syariah yang ada di Indonesia dan telah terdaftar pada SEKI (Statistik Keuangan Indonesia) antara lain:

1. 5 Bank Umum Syariah:
 - Bank Muamalat Indonesia
 - Bank Negara Indonesia Syariah
 - Bank Syariah Mandiri
 - Bank Mega Syariah
 - Bank Tabungan Negara Syariah
2. 24 Unit Usaha Syariah
3. 137 Bank Pengkreditan Rakyat Syariah

3.3.2. Sampel

Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan metode *purposive sampling* yaitu pemilihan sampel dimana populasi dan tujuan yang spesifik dari penelitian, yang diketahui peneliti sejak awal. Sampel yang dipilih perlu diketahui terlebih dahulu karakteristiknya sehingga sampel relevan dengan tujuan masalah penelitian. Adapun kriteria yang ditetapkan adalah:

- Memiliki laporan keuangan lengkap selama periode penelitian.

3.2. Data dan Sumber Data

3.4.1. Metode Pengumpulan Data

Data ini diperoleh dari catatan-catatan yang sudah disediakan oleh SEKI baik melalui internet maupun media lainnya.

3.4.2. Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber dari laporan keuangan. Jenis data mencakup:

1. Data alokasi dana pihak ketiga yang dihimpun bank syariah
2. Data tentang pembiayaan UKM
3. Data tentang margin (pinjaman)
4. Data tentang tingkat inflasi di Indonesia

Dalam penelitian ini sumber data yang diambil yakni dari www.SEKI.co.id dan www.google.com

3.2. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Penelitian ini menggunakan variabel terikat (*dependent variabel*), variabel bebas (*independent variabel*).

3.5.1. Variabel Terikat (*Dependent Variabel*)

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah:

1. Pembiayaan Usaha Kecil Menengah (Rp)

Pembiayaan yaitu (Undang-undang perbankan No 10) Penyediaan Uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau

kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil (Kasmir, 2004: 92)

3.5.2. Variabel Bebas (*Independent Variable*)

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah:

1. Jumlah Dana Pihak Ketiga (Rp)
2. Tingkat Margin (%)
3. Inflasi (%)

3.2. Model Analisis Data

Model analisis data yang digunakan adalah statistik dengan pendekatan deskriptif, dimana setelah data diperoleh, langkah selanjutnya adalah melakukan analisis data. Indriantoro, dkk (1999:11) mendefinisikan analisis data sebagai bagian dari proses pengujian data yang hasilnya digunakan sebagai bukti yang memadai untuk menarik kesimpulan.

Pada buku karya Suharyadi dan Purwanto (2003: 514-526), analisis regresi bergandada korelasi berganda, antara lain, tahapan-tahapan analisis data dari penelitian ini adalah:

3.6.1. Uji Independensi Variabel

1. Analisis Varian (Uji F)

Dimaksudkan untuk melihat kemampuan menyeluruh dari variabel bebas yaitu $X_1, X_2, X_3, \dots, X_k$, untuk dapat atau mampu menjelaskan tingkah laku atau

keragaman variabel tidak bebas Y. Uji Global juga dimaksudkan untuk mengetahui apakah semua variabel bebas memiliki koefisien regresi sama dengan nol (Suharyadi, 2004: 523). Hipotesis yang digunakan adalah:

- a. $H_0: b_1 = b_2 = \dots = b_k = 0$ (model regresi linier berganda tidak signifikan atau dengan kata lain tidak ada hubungan linier antara variabel independen terhadap variabel dependen).
- b. $H_1: b_1 \neq 0$ (model regresi linier berganda signifikan atau dengan kata lain ada hubungan linier antara variabel independen terhadap variabel dependen). (Budi Santosa, 2007: 143)

2. Koefisien Determinasi Majemuk (R^2)

Merupakan ukuran untuk mengetahui kesesuaian atau ketetapan hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen dalam suatu persamaan regresi. Dengan kata lain, koefisien determinasi menunjukkan kemampuan variabel X (X_1, X_2, \dots, X_k) yang merupakan variabel bebas menerangkan atau menjelaskan variabel Y yang merupakan variabel tidak bebas. Semakin besar nilai koefisien determinasi semakin baik kemampuan variabel X menerangkan atau menjelaskan variabel Y.

Nilai R^2 akan berkisar 0 sampai 1. Apabila nilai $R^2 = 1$ menunjukkan bahwa 100% total variasi diterangkan oleh varian persamaan regresi, atau variabel bebas mampu menerangkan variabel terikat. Sebesar 100% sebaliknya apabila nilai $R^2 = 0$ menunjukkan bahwa tidak ada total varian yang diterangkan oleh varian bebas dari persamaan regresi baik X^1 maupun X^2 .

Nilai koefisien determinasi dikatakan baik apabila $> 0,5$ menunjukkan variabel bebas dapat menjelaskan variabel terikat dengan baik atau kuat, $= 0,5$ dikatakan sedang dan $< 0,5$ relatif kurang baik. Hal ini disebabkan mungkin salah satu diantaranya adalah spesifikasi model yang salah yaitu pemilihan variabel yang kurang tepat atau pengukuran yang tidak akurat (Suharyadi, 2004: 514-515).

3. Uji Parsial (t-test)

Digunakan untuk menguji apakah suatu variabel bebas berpengaruh atau tidak terhadap variabel tidak bebas. Pada regresi berganda $Y = a + b_1 X_1 + b_2 X_2 + \dots + b_k X_k$, mungkin secara bersama-sama pengaruh semua variabel dari X_1 sampai X_k nyata. Namun belum demikian belum tentu secara individual atau parsial seluruh variabel dari X_1 sampai X_k berpengaruh nyata terhadap variabel tidak bebasnya Y (Suharyadi: 2004: 525). Hipotesis yang digunakan adalah:

- 1) $H_0: b_i = 0$ (tidak ada hubungan linier antara variabel independen dan variabel dependen)
- 2) $H_1: b_i \neq 0$ (ada hubungan linier antara variabel independen dan variabel dependen). (Budi Santosa, 2007:146)

3.6.2. Uji Asumsi Regresi Linier Berganda

1. Multikolinieritas

Dikemukakan pertama kali oleh Ragner Frish dalam bukunya "*Statistical Confluence Analysis by Means of Complete Regression Systems*". Frish

menyatakan bahwa multikolinier adalah adanya lebih dari satu hubungan linier yang sempurna.

Uji Multikolinieritas diperlukan untuk mengetahui ada tidaknya variabel independen yang memiliki kemiripan dengan variabel independen lain dalam satu model. Kemiripan antar variabel independen dalam suatu model akan menyebabkan terjadinya korelasi yang sangat kuat antara suatu variabel independen dengan variabel independen yang lain. Deteksi multikolinieritas pada suatu model dapat dilihat dari beberapa hal, yaitu jika *Variance Inflation Factor* (VIF) tidak lebih dari 10 dan jika *Tolerance* tidak kurang dari 0,1, maka model dapat dikatakan terbebas dari multikolinieritas. (Agung, 2007: 58)

2. Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas untuk menunjukkan nilai varian ($Y - \hat{Y}$) antar-nilai Y tidaklah sama atau hetero. hal demikian sering terjadi pada data yang bersifat *cross section*, yaitu data yang dihasilkan pada suatu waktu dengan responden yang banyak.

Heteroskedastisitas menguji terjadinya perbedaan *variance residual* suatu periode pengamatan ke periode pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah model regresi yang memiliki persamaan *variance residual* suatu periode pengamatan dengan periode pengamatan yang lain sehingga dapat dikatakan model tersebut homoskedastisitas dan tidak terjadi heteroskedastisitas. Cara memprediksi ada tidaknya homoskedastisitas pada suatu model dapat dilihat dari pola gambar Scatterplot model tersebut, analisisnya dapat dilihat jika:

- a. Titik-titik data menyebar di atas dan di bawah atau di sekitar angka 0.
- b. Titik-titik data tidak mengumpul hanya di atas atau di bawah saja.
- c. Penyebaran titik-titik data tidak boleh membentuk pola bergelombang melebar kemudian menyempit dan melebar kembali.
- d. Penyebaran titik-titik data sebaiknya tidak berpola. (Agung, 2007: 62-65)

3. Autokorelasi

Autokorelasi dikenalkan oleh Maurice G. Kendall dan William R. Buckland. Autokorelasi merupakan korelasi antar anggota observasi yang disusun menurut aturan waktu. (Suharyadi dan Purwanto, 2003: 528-529)

Menguji autokorelasi dalam suatu model bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya korelasi antara variabel pengganggu (e_t) pada periode tertentu dengan variabel pengganggu periode sebelumnya (e_{t-1}). Cara mudah mendeteksi autokorelasi dapat dilakukan dengan uji Durbin Watson. Model regresi linier berganda terbebas dari autokorelasi jika nilai Durbin hitung terletak di daerah *No Autocorelasi*. Penentuan letak tersebut dibantu dengan tabel d_L dan d_U , dibantu dengan nilai k (jumlah variabel independen). (Agung, 2007: 59).

Aturan pengujiannya adalah:

- a. $0 < d < d_L$: tidak ada korelasi diri positif (Tolak H_0) atau terdapat masalah autokorelasi
- b. $d_L < d < d_U$: tidak ada korelasi diri positif (Tidak ada) atau tidak ada masalah autokorelasi

- c. $4-d_u < d < 4$: tidak ada korelasi diri negatif (Tolak H_0) atau terdapat masalah autokorelasi
- d. $4-d_u < d < 4-d_L$: tidak ada korelasi diri negatif (Tidak ada) atau tidak ada masalah autokorelasi.
- e. $d_u - d < 4 - d_u$: tidak ada korelasi diri positif/negatif (Terima H_0) atau tidak ada masalah autokorelasi.

Tabel 3.1

Metode Analisis

Tujuan Penelitian	Analisis Data
Untuk mengetahui pengaruh signifikansi jumlah dana pihak ketiga, inflasi dan tingkat margin secara bersama terhadap alokasi pembiayaan UKM	Analisis Varian (Uji-F), Uji t-test, Uji R square, Multikolinieritas, Heterokedastisitas, Autokorelasi
Untuk mengetahui pengaruh signifikansi dana pihak ketiga, inflasi dan tingkat margin secara individu terhadap alokasi pembiayaan UKM	Analisis Varian (Uji-F), Uji t-test, Uji R square, Multikolinieritas, Heterokedastisitas, Autokorelasi
Untuk mengetahui manakah dari variabel jumlah dana pihak ketiga, inflasi dan tingkat margin yang berpengaruh dominan terhadap alokasi pembiayaan UKM	Uji t-test

Sumber: Data diolah

BAB IV

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

4.1. Gambaran Umum Objek Penelitian

4.1.1. Kondisi Bank Syariah di Indonesia

Sektor hukum perbankan di Indonesia mengalami perkembangan signifikan dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Hal ini terjadi karena di dalam kebijakan perbankan di Indonesia pasca diundangkannya undang-undang ini secara tegas mengakui eksistensi dari bank Islam (*islamic banking*) atau yang lebih kita kenal dengan bank syariah.

Berbeda dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 yang mengenal bank syariah semata-mata hanya bank yang mendasarkan pengelolaannya berdasarkan bagi hasil, maka dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 secara tegas mengakui eksistensi bank dengan prinsip syariah disamping bank konvensional yang berbasis pada bunga.

Perkembangan perbankan syariah terus menunjukkan kecenderungan yang mengembirakan, sampai dengan desember 2009 jumlah perbankan syariah telah mencapai 5 BUS (Bank Umum Syariah) dengan 660 jumlah kantor, 24 UUS (Unit Usaha Syariah), 137 BPRS (Bank Pengkreditan Rakyat Syariah), dengan 1.144 kantor yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Produk dan jasa yang ditawarkan pun sangat beragam, sehingga *share* perbankan syariah

sudah mencapai 1,97%. *Share* perbankan syariah diharapkan akan terus meningkat dan dapat mencapai target 5% pada akhir tahun 2011. (SEKI: BI)

Terlepas dari perkembangan yang cukup menggembirakan, dalam dua tahun terakhir ini pertumbuhan perbankan syariah mengalami perlambatan. Terdapat banyak faktor yang mempengaruhinya antara lain adalah faktor kompetisi dengan perbankan konvensional. Hal ini tidak terlepas dari sistem perbankan yang dianut, yaitu *dual banking system*, sehingga nasabah masih dapat melakukan pilihan antara bank konvensional dengan bank syariah. (Nurul Huda, 2009: 2)

Pertumbuhan industri perbankan syariah pada 2008 cukup meredup justru ketika diprediksikan bisa mencetak sejarah menguasai 5% aset perbankan nasional. Dana pihak ketiga hanya tumbuh 22,88%, jauh lebih rendah dari pertumbuhan 2007 sebesar 35,46%. Berdasarkan data BI, hingga november 2008, bank syariah membukukan dana pihak ketiga Rp 34,42 triliun dari posisi akhir 2007 sebesar Rp 28,01 triliun. Pada akhir 2006, bank jenis ini menghimpun dana Rp 20,67 triliun. Dari sisi aset, dalam sebelas bulan 2008 terjadi pertumbuhan Rp10,64 triliun atau 29,12% dari akhir 2007 sebesar Rp36,53 triliun. (<http://wahyudiululalbab.wordpress.com>)

Faktor lain yang membuat bank syariah tumbuh sebenarnya telah dilakukan pada pertama tahun 2009. Salah satunya adalah pengadaan lelang Sertifikat Bank Indonesia (SBI) Syariah. Hanya saja, ini tak cukup menarik terbukti dari penempatan dana di BI justru tinggal Rp 3,5 triliun dari akhir 2007 sebesar Rp 4,8 triliun. Selain itu, Undang-undang perbankan syariah

sudah disahkan pada kuartal pertama 2008. Terakhir, pemerintah pada 24 Agustus 2008 melelang obligasi negara syariah (sukuk) perdana. Namun, minat perbankan syariah pada instrumen tersebut juga cukup menggembirakan. Ini terbukti dari kontribusi penawaran sebesar Rp 780 miliar dari sukuk yang diterbitkan Rp 4,69 triliun. (<http://wahyudiululbab.wordpress.com>)

4.1.2. Peran UKM dalam Perekonomian Indonesia

Di Indonesia, peranan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) mempunyai peranan yang cukup penting terutama bila ditilik dari segi jumlah unit usaha dan tenaga kerja yang diserapnya. Keberadaan UKM di tanah air kita memang mewakili hampir seluruh unit usaha di berbagai sektor ekonomi yang hidup dalam perekonomian kita, karena jumlahnya yang amat besar. Sampai saat ini usaha kecil mewakili sekitar 99,85 % dari jumlah unit usaha yang ada, sedangkan usaha menengah sebesar 0,14% saja, sehingga usaha besar hanya merupakan 0,01%. Dengan demikian corak perekonomian kita ditinjau dari subyek hukum pelaku usaha adalah ekonomi rakyat yang terdiri dari usaha kecil di berbagai sektor, terutama sektor pertanian dan perdagangan maupun jasa serta industri pengolahan.

Ditinjau dari posisi dalam mendukung tiga tujuan makro diatas, maka Usaha Kecil dan Menengah (UKM) menempati posisi sangat strategis karena menyumbang lebih dari 88% penyerapan tenaga kerja. Posisi sangat penting untuk menjamin stabilitas makro, terutama stabilitas sosial yang akhir-akhir ini menjadi sangat kritis sebagai penentu kelangsungan pertumbuhan kita dan

investasi baru untuk melangsungkan pertumbuhan. Dari data sumbangan sektor yang dominan digerakkan ekonomi rakyat, maka jika terdapat masalah mendesak kita adalah kesempatan kerja seharusnya secara sungguh-sungguh investasi di bidang itu untuk memelihara pertumbuhan dan sekaligus menciptakan kesempatan kerja, serta memperkuat posisi ekspor kita di masa depan.

Dalam hal penyerapan tenaga kerja, peran UMKM pada tahun 2006 tercatat sebesar 89.547.762 orang atau 97,34 % dari total penyerapan tenaga kerja yang ada, kontribusi UMK tercatat sebanyak 85.053.069 orang atau 92,46 % dan UM sebanyak 4.494.693 orang atau 4,89 %. Untuk UK sektor Pertanian, Peternakan, Perhutanan dan Perikanan tercatat memiliki peran terbesar dalam penyerapan tenaga kerja yaitu sebanyak 41.534.635 orang atau 48,83 % dari total tenaga kerja yang diserap. Sedangkan sektor ekonomi yang memiliki penyerapan tenaga kerja terbesar pada UM adalah sektor industri pengolahan yaitu sebanyak 1.918.824 orang atau 42,69 %.

Dalam hal penyerapan tenaga kerja, peran UMKM pada tahun 2007 tercatat sebesar 88.739.744 orang atau 96,95 % dari total penyerapan tenaga kerja yang ada, kontribusi usaha mikro tercatat sebanyak 81.732.430 orang atau 89,30 % dan UK tercatat sebanyak 3.864.995 orang atau 4,22 %. Sedangkan UM sebanyak 3.142.319 orang atau 3,43 % selebihnya adalah UB. Pada tahun 2007, untuk usaha mikro sektor pertanian, peternakan, perhutanan dan perikanan tercatat memiliki peran terbesar dalam penyerapan tenaga kerja yaitu sebanyak 41.673.522 orang atau 50,99 % dari total tenaga kerja yang diserap. Untuk

sektor ekonomi yang memiliki penyerapan tenaga kerja terbesar pada UK adalah sektor industri pengolahan yaitu sebanyak 1.595.918 orang atau 41,29 %. Sedangkan penyerapan tenaga kerja terbesar pada UM adalah sektor industri pengolahan yaitu sebanyak 1.468.522 orang atau 46,73 %.

Pada tahun 2008, UMKM mampu menyerap tenaga kerja sebesar 90.896.270 orang atau 97,04 % dari total penyerapan tenaga kerja yang ada, jumlah ini meningkat sebesar 2,43 % atau 2.156.526 orang dibandingkan tahun 2007. Kontribusi usaha mikro tercatat sebanyak 83.647.711 orang atau 89,30 % dan UK sebanyak 3.992.371 orang atau 4,26 %. Sedangkan UM tercatat sebanyak 3.256.188 orang atau 3,48 %. Untuk usaha mikro sektor pertanian, peternakan, perhutanan dan perikanan tercatat memiliki peran terbesar dalam penyerapan tenaga kerja yaitu sebanyak 41.749.303 orang atau 49,91 % dari total tenaga kerja yang di serap. Jumlah tersebut meningkat sebesar 75.781 orang atau 0,18 % dari tahun sebelumnya. Untuk sektor ekonomi yang memiliki penyerapan tenaga kerja terbesar pada UK adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran yaitu sebanyak 1.672.351 orang atau 41,89 %. Sedangkan yang memiliki penyerapan tenaga kerja terbesar pada UM adalah sektor industri pengolahan yaitu sebanyak 1.464.915 orang atau 44,99 %. (www.depkop.go.id)

Tabel 4.1
Penyerapan Tenaga Kerja Menurut Skala Usaha
Tahun 2006 – 2008

No	Skala Usaha	Jumlah (Orang)		
		2006	2007	2008
1	Usaha Mikro	81.398.302	81.732.430	83.647.711
2	Usaha Kecil	3.654.767	3.864.995	3.992.371
3	Usaha Menengah	4.494.693	3.142.319	3.256.188
Jumlah		79.819.488	88.739.744	90.896.270

Sumber: BPS

Berdasarkan dari penjelasan di atas, maka sudah sepantasnya bila pemerintah tidak menyampingkan peran UKM sebagai salah satu penggerak kegiatan ekonomi di Indonesia. Sebaliknya, pemerintah harus turut berperan serta dalam memberdayakan UKM di antaranya dengan menciptakan kebijaksanaan yang berpihak pada UKM.

Meski begitu terdapat beberapa kendala yang dihadapi Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dalam mengembangkannya, umumnya permasalahan yang dihadapi oleh UKM, antara lain meliputi :

1. Faktor Internal

a. Kurangnya Permodalan

Permodalan merupakan faktor utama yang diperlukan untuk mengembangkan suatu unit usaha. Kurangnya permodalan UKM karena pada umumnya usaha kecil dan menengah merupakan usaha perorangan atau perusahaan yang sifatnya tertutup, yang mengandalkan pada modal

dari si pemilik yang jumlahnya sangat terbatas, sedangkan modal pinjaman dari bank atau lembaga keuangan lainnya sulit diperoleh, karena persyaratan secara administratif dan teknis yang diminta oleh bank tidak dapat dipenuhi.

b. Sumber Daya Manusia (SDM) yang Terbatas

Sebagian besar usaha kecil tumbuh secara tradisional dan merupakan usaha keluarga yang turun temurun. Keterbatasan SDM usaha kecil baik dari segi pendidikan formal maupun pengetahuan dan keterampilannya sangat berpengaruh terhadap manajemen pengelolaan usahanya, sehingga usaha tersebut sulit untuk berkembang dengan optimal. Disamping itu dengan keterbatasan SDM nya, unit usaha tersebut relatif sulit untuk mengadopsi perkembangan teknologi baru untuk meningkatkan daya saing produk yang dihasilkannya.

c. Lemahnya Jaringan Usaha dan Kemampuan Penetrasi Pasar

Usaha kecil yang pada umumnya merupakan unit usaha keluarga, mempunyai jaringan usaha yang sangat terbatas dan kemampuan penetrasi pasar yang rendah, oleh karena produk yang dihasilkan jumlahnya sangat terbatas dan mempunyai kualitas yang kurang kompetitif. Berbeda dengan usaha besar yang telah mempunyai jaringan yang sudah solid serta didukung dengan teknologi yang dapat menjangkau internasional dan promosi yang baik.

2. Faktor Eksternal

a. Iklim Usaha Belum Sepenuhnya Kondusif

Kebijakan Pemerintah untuk menumbuhkembangkan Usaha Kecil dan Menengah (UKM), meskipun dari tahun ke tahun terus disempurnakan, namun dirasakan belum sepenuhnya kondusif. Hal ini terlihat antara lain masih terjadinya persaingan yang kurang sehat antara pengusaha-pengusaha kecil dengan pengusaha-pengusaha besar.

b. Terbatasnya Sarana dan Prasarana Usaha

Kurangnya informasi yang berhubungan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, menyebabkan sarana dan prasarana yang mereka miliki juga tidak cepat berkembang dan kurang mendukung kemajuan usahanya sebagaimana yang diharapkan.

c. Implikasi Otonomi Daerah

Dengan berlakunya Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah, kewenangan daerah mempunyai otonomi untuk mengatur dan mengurus masyarakat setempat. Perubahan sistem ini akan mengalami implikasi terhadap pelaku bisnis kecil dan menengah berupa pungutan-pungutan baru yang dikenakan pada UKM. Jika kondisi ini tidak segera dibenahi maka akan menurunkan daya saing Usaha Kecil dan Menengah (UKM).

d. Implikasi Perdagangan Bebas

Sebagaimana diketahui bahwa AFTA yang mulai berlaku Tahun 2003 dan APEC Tahun 2020 yang berimplikasi luas terhadap usaha kecil dan menengah untuk bersaing dalam perdagangan bebas. Dalam hal ini, mau tidak mau Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dituntut untuk melakukan proses produksi dengan produktif dan efisien, serta dapat menghasilkan produk yang sesuai dengan frekuensi pasar global dengan standar kualitas seperti isu kualitas (ISO 9000), isu lingkungan (ISO 14.000) dan isu Hak Asasi Manusia (HAM) serta isu ketenagakerjaan.

e. Sifat Produk Dengan *Lifetime* Pendek

Sebagian besar produk industri kecil memiliki ciri atau karakteristik sebagai produk-produk *fashion* dan kerajinan dengan *lifetime* yang pendek.

f. Terbatasnya Akses Pasar

Terbatasnya akses pasar akan menyebabkan produk yang dihasilkan tidak dapat dipasarkan secara kompetitif baik di pasar nasional maupun internasional. (Infokop Nomor 25 Tahun xx, 2004)

4.1.3. Kebijakan Bank Indonesia dan Bank-Bank Syariah dalam Penyaluran Pembiayaan (Kredit) Usaha Kecil dan Menengah

Dalam rangka mengembangkan Usaha Kecil dan Menengah (UKM), Bank Indonesia telah mewajibkan bank umum atau bank umum syariah untuk menyalurkan kredit kepada usaha kecil dalam presentase tertentu. Untuk mengoptimalkan pemberian pembiayaan oleh bank-bank kepada UKM, Bank Indonesia bersama dengan perbankan selama ini telah menempuh tiga strategi dasar sebagai berikut

Pertama, penerapan batas minimum pemberian kredit sebesar 20% dari keseluruhan kredit bagi semua bank, sesuai dengan ketentuan serta penyediaan fasilitas kredit likuiditas untuk membiayai sektor yang menjadi prioritas yaitu pengembangan koperasi, pengadaan pangan dan pemilikan rumah sederhana. Hal ini dilaksanakan dalam pemberian KLBI untuk KUT, KKUD, KKPA, dan bulog.

Kedua, mengembangkan kelembagaan dengan memperluas jaringan perbankan, mendorong kerjasama antar bank dalam penyaluran pembiayaan atau kredit Usaha Kecil dan Menengah (UKM), dan mengembangkan lembaga-lembaga keuangan yang sesuai dengan kebutuhan penduduk berpenghasilan rendah, seperti pendirian BPR.

Ketiga, pemberian bantuan teknis melalui Proyek Pengembangan Usaha Kecil (PPUK), Proyek Hubungan Bank dengan Kelompok Swadaya Masyarakat (PHBK), dan Proyek Kredit Mikro (PKM). Dengan PPUK diharapkan dapat

mengubah sikap, pendekatan, dan ketrampilan petugas perkreditan bank dalam penanganan kredit usaha kecil. (Suhardjono, 2005: 46-47)

Bank Indonesia dan bank-bank umum telah melakukan suatu tindakan strategis untuk meningkatkan perkembangan sektor riil melalui kredit yang disalurkan kepada UKM. UKM sebagai sasaran pokok dari strategi kebijakan perbankan dalam pembiayaan UKM tersebut diharapkan dapat menyerap penuh dana dari bank-bank syariah. Penyerapan dana dari bank-bank syariah oleh UKM dengan demikian patut untuk selalu diperhatikan, sehingga jika ditemukan kendala ditengah jalan dapat segera dicarikan solusinya.

4.1.4. Kebijakan Pemerintah dalam Mengembangkan UKM di Indonesia

Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) pada hakekatnya merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. Dengan mencermati permasalahan yang dihadapi oleh UKM, maka kedepan perlu diupayakan hal-hal sebagai berikut :

1. Penciptaan Iklim Usaha yang Kondusif

Pemerintah perlu mengupayakan terciptanya iklim yang kondusif antara lain dengan mengusahakan ketenteraman dan keamanan serta penyederhanaan prosedur perijinan usaha, keringanan pajak dan sebagainya.

2. Perlindungan Usaha

Jenis-jenis usaha tertentu, terutama jenis usaha tradisional yang merupakan usaha golongan ekonomi lemah, harus mendapatkan perlindungan dari

pemerintah, baik itu melalui undang-undang maupun peraturan pemerintah yang bermuara kepada saling menguntungkan (*win-win solution*).

3. Pengembangan Kemitraan

Perlu dikembangkan kemitraan yang saling membantu antara UKM, atau antara UKM dengan pengusaha besar di dalam negeri maupun di luar negeri, untuk menghindari terjadinya monopoli dalam usaha. Disamping itu juga untuk memperluas pangsa pasar dan pengelolaan bisnis yang lebih efisien. Dengan demikian UKM akan mempunyai kekuatan dalam bersaing dengan pelaku bisnis lainnya, baik dari dalam maupun luar negeri.

4. Pelatihan

Pemerintah perlu meningkatkan pelatihan bagi UKM baik dalam aspek kewiraswastaan, manajemen, administrasi dan pengetahuan serta ketrampilannya dalam pengembangan usahanya. Disamping itu juga perlu diberi kesempatan untuk menerapkan hasil pelatihan di lapangan untuk mempraktekkan teori melalui pengembangan kemitraan rintisan.

5. Membentuk Lembaga Khusus

Perlu dibangun suatu lembaga yang khusus bertanggung jawab dalam mengkoordinasikan semua kegiatan yang berkaitan dengan upaya penumbuhkembangan UKM dan juga berfungsi untuk mencari solusi dalam

rangka mengatasi permasalahan baik internal maupun eksternal yang dihadapi oleh UKM.

6. Memantapkan Asosiasi

Asosiasi yang telah ada perlu diperkuat, untuk meningkatkan perannya antara lain dalam pengembangan jaringan informasi usaha yang sangat dibutuhkan untuk pengembangan usaha bagi anggotanya.

7. Mengembangkan Promosi

Guna lebih mempercepat proses kemitraan antara UKM dengan usaha besar diperlukan media khusus dalam upaya mempromosikan produk-produk yang dihasilkan. Disamping itu perlu juga diadakan *talk show* antara asosiasi dengan mitra usahanya.

8. Mengembangkan Kerjasama yang Setara

Perlu adanya kerjasama atau koordinasi yang serasi antara pemerintah dengan dunia usaha (UKM) untuk menginventarisir berbagai isu-isu mutakhir yang terkait dengan perkembangan usaha.

Dengan batasan tersebut, maka diharapkan peranan pemerintah maupun masyarakat perlu memberikan perhatian yang besar untuk mendorong pengembangannya. Pengembangan UKM melalui pendekatan pemberdayaan usaha, perlu memperhatikan aspek sosial dan budaya di masing-masing daerah,

mengingat UKM pada umumnya tumbuh dari masyarakat secara langsung.
(Biro Humas dan TU Pimpinan)

4.1.5. Kondisi Historis UKM di Indonesia dan Prospek Kedepan

Menurut Drs. Hidayat MA, dalam majalah forum ekonomi, presentase sektor usaha kecil dan sektor informal di sebagian kota-kota besar di Indonesia adalah; Jakarta sebesar 50 %, Bandung sebesar 65 %, Semarang sebesar 40 %, Yogyakarta sebesar 35 %, Surabaya sebesar 45 %. Presentase tersebut sebagian besar berusaha dalam usaha perdagangan. Bidang perdagangan merupakan bidang yang lebih memungkinkan, karena memiliki syarat usaha yang tidak seperti usaha besar yaitu keahlian khusus dan modal permulaan yang besar.

Hubungan bisnis yang saling menunjang pasti dibutuhkan oleh perusahaan besar atau perusahaan perdagangan yang besar untuk memacu penggunaan keterampilan dan nilai ekonomis dari usaha kecil. Perusahaan-perusahaan besar harus membeli bahan baku dan mengangkutnya ke pabrik, subkontrak pembuatan komponen, membangun jaringan distribusi, penjualan dalam jumlah besar maupun eceran, serta jaringan jasa pelayanan dan perbaikan. Aktivitas saling tunjang ini dapat dilaksanakan oleh usaha kecil, karena perusahaan besar umumnya hanya menangani pekerjaan dalam skala besar yang lebih vital.

Perusahaan besar menyadari pentingnya peran perusahaan kecil, tentunya akan mengadakan hubungan dan melaksanakan pembinaan, pelatihan serta pengembangan usaha kecil yang berlokasi dekat dengan perusahaannya. Wirausaha yang dinamis dan ulet mampu melihat peluang dan seringkali

menjadi agen-agen utama dari perusahaan besar dan mampu berkembang menjadi penyalur atau pedagang besar juga pada akhirnya, agen jasa (misalnya: catering dan lainnya) atau perbengkelan yang besar.

Dengan adanya *share* atau bagian pekerjaan yang terbuka sedemikian karena terciptanya suatu sistem produksi, maka sebenarnya selalu ada peluang dengan pola hubungan keterkaitan antara perusahaan besar dan perusahaan kecil dengan berbagai model keterkaitan kerjasama yang menguntungkan. Pola hubungan yang ideal tersebut dapat dirumuskan menjadi seperti pada Tabel 4.2 berikut:

Tabel 4.2
Pola Hubungan Kerjasama Perusahaan Besar-Menengah-Kecil

Perusahaan Besar	Perusahaan Menengah	Perusahaan Kecil
Perdagangan	Grosir	Agen dan pengecer
Industri	Supplier bahan baku	Reparasi, jasa, transportasi
Perusahaan Ekspor	Pengumpul barang kerajinan	Industri kecil (produsen)

Sumber : Harimurti , 2001

Usaha besar, menengah dan kecil sudah seharusnya melaksanakan sinergisitas dalam perekonomian. Penyerapan tenaga kerja pengurangan pengangguran akan dapat terlaksana jika ketiga skala usaha ini dapat bekerjasama saling melengkapi dan berkaitan. Pemerintah dengan

kebijakannya diharapkan mampu untuk menciptakan keamanan yang dapat mengakomodasi dan melancarkan proses pola hubungan tersebut.

4.2. Deskripsi Hasil Penelitian

4.2.1. Pembiayaan Usaha Kecil dan Menengah Bank Syariah di Indonesia.

Dari data yang dikumpulkan oleh Bank Indonesia dalam Statistik Ekonomi Keuangan Indonesia (SEKI), menunjukkan bahwa jumlah alokasi pembiayaan usaha kecil dan menengah (UKM) pada bank-bank syariah tergolong memuaskan meski tidak seperti bank-bank umum di Indonesia yang mencapai ratusan triliun tapi paling tidak dalam tiap tahun alokasi pembiayaan usaha kecil pada bank syariah meningkat tiap tahunnya. Jumlah dalam triliun rupiah diperlihatkan, pada awal tahun penelitian tahun 2007 januari sebesar Rp 14,58 triliun. Alokasi pembiayaan UKM kemudian stabil dengan terus mengalami kenaikan sampai dengan bulan desember dengan peningkatan jumlah alokasi pembiayaan UKM sebesar Rp 19,57 triliun, hal ini menunjukkan bahwa sektor riil mulai mengalami pertumbuhan yang subur.

Data SEKI BI kemudian memperlihatkan pada tahun awal tahun 2008 alokasi pembiayaan UKM terus mengalami kenaikan secara signifikan sampai bulan november Rp 27,90 triliun, akan tetapi untuk bulan kedepannya yakni bulan desember dan januari 2009 berturut turut mengalami sedikit penurunan yakni sampai Rp 26,75 triliun pada bulan januari, meski tidak banyak akan tetapi hal ini tidak pernah terjadi pada tahun sebelumnya. Bulan februari tahun 2009 kondisi mulai membaik yakni Rp 27,86 triliun dari bulan januari 2009

yang hanya Rp 26,75 triliun. Kondisi kenaikan pada february seperti ini stabil mengalami kenaikan secara signifikan sampai tujuh bulan mendatang, hampir sama seperti keadaan alokasi pembiayaan UKM pada tahun sebelumnya yang stabil mengalami kenaikan. Kemudian pada bulan selanjutnya yaitu oktober baru mengalami penurunan yang tidak disangka karena menurun sampai Rp 3 triliun dari sebelumnya yang pada bulan september Rp 32,57 triliun menjadi Rp 29,21 triliun, hal ini dipicu oleh datangnya produk Impor dari AFTA-CINA akibat pasar bebas sehingga menyebabkan merosotnya perkembangan penjualan dari dalam negeri akibat pasokan dari barang impor.

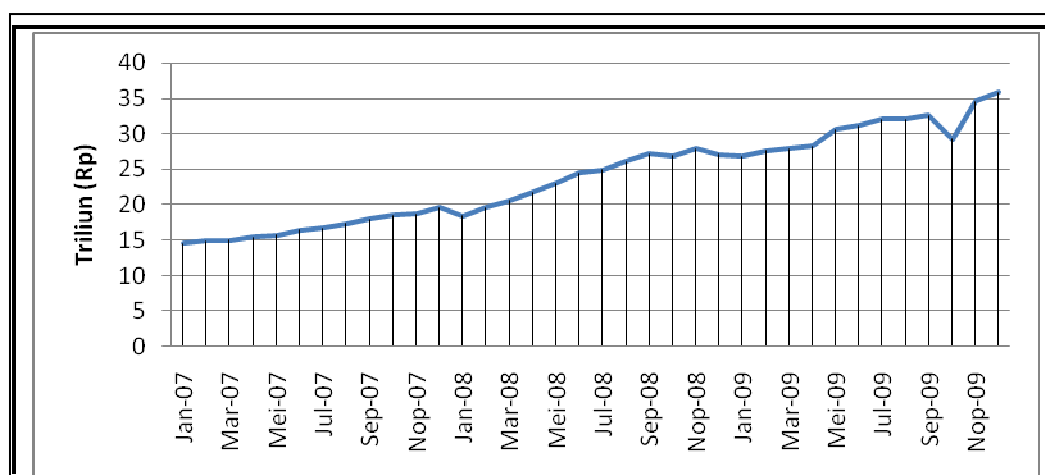
Kondisi alokasi pembiayaan UKM secara sepintas jika kita mengamati akan menunjukkan kepuasan dalam pelaksanaannya akan tetapi dalam penelitian ini juga dapat dilihat perkembangannya sebelum masuknya AFTA-CINA sampai perkembangan setelahnya. Seperti yang diperlihatkan kepada kita bagaimana alokasi pembiayaan UKM ini berjalan dapat diamati dengan mudah dari tabel 4.3 tentang alokasi pembiayaan UKM pada bank-bank syariah yang diambil sumbernya dari Statistik Ekonomi Keuangan Indonesia (SEKI:BI) dibawah ini:

Tabel 4.3
Jumlah Alokasi Pembiayaan UKM Bank-Bank Syariah

Tahun/Bulan	UKM (Triliun Rp)	Tahun/Bulan	UKM (Triliun Rp)
2007;01	14,58	2008;07	24,91
2007;02	14,91	2008;08	26,01
2007;03	15,00	2008;09	27,18
2007;04	15,49	2008;10	26,87
2007;05	15,71	2008;11	27,90
2007;06	16,44	2008;12	27,06
2007;07	16,75	2009;01	26,75
2007;08	17,31	2009;02	27,58
2007;09	17,91	2009;03	27,86
2007;10	18,45	2009;04	28,24
2007;11	18,64	2009;05	30,50
2007;12	19,57	2009;06	31,15
2008;01	18,38	2009;07	31,94
2008;02	19,56	2009;08	31,94
2008;03	20,57	2009;09	32,57
2008;04	21,75	2009;10	29,21
2008;05	23,03	2009;11	34,50
2008;06	24,45	2009;12	35,80

Sumber: SEKI BI, 2009

Gambar 4.1
Pertumbuhan Alokasi Pembiayaan UKM 2007-2009



Sumber: Data diolah

4.2.2. Jumlah Penghimpunan Dana Pihak Ketiga Bank Syariah di Indonesia

Dari data SEKI BI dapat ditelusuri tentang bagaimana kondisi jumlah penghimpunan dana dari pihak ketiga pada bank-bank syariah di Indonesia. Pada awal tahun penelitian yaitu 2007 bulan januari jumlah penghimpunan dana pihak ketiga sebesar Rp 20,514 triliun, jumlah ini cukup besar meski tidak sebanding dengan bank-bank umum tetapi kiranya menggembirakan bagi kita bahwa bukti kondisi perbankan syariah sudah makin diterima dimata masyarakat. Kondisi tersebut mengalami kenaikan secara signifikan selama satu tahun kedepan. Baru pada awal tahun 2008 menunjukkan penurunan yang mana pada desember 2007 Rp 28,011 triliun, mengalami penurunan hingga mencapai Rp 27,695 triliun, tetapi hal ini hanya berlangsung pada awal tahun itu saja menginjak bulan kedua kondisi mulai stabil kembali hingga bulan desember 2008 hingga mencapai Rp 36,852 triliun, menginjak awal tahun kedepan hal ini terus berlanjut secara baik dan kondisi perbankan syariah terus mengalami pertumbuhan hal ini dapat dilihat dari jumlah dana yang disalurkan dari pihak ketiga terus menanjak hingga akhir tahun 2009.

Suatu kondisi yang menyenangkan perbankan, karena dengan melihat data yang demikian kita dapat mengetahui bahwa perbankan syariah telah tepat menerapkan strateginya untuk menghimpun dana pihak ketiga. Dana pihak ketiga merupakan modal utama bagi bank untuk menunjukkan eksistensinya pada dunia ekonomi. Kegembiraan ini kemudian tetap menunjukkan peningkatannya karena pada awal tahun 2008 dan selama dua puluh empat bulan kedepan

jumlah penghimpunan dana bank-bank syariah di Indonesia naik, kemudian ditutup dengan akhir tahun penelitian yaitu 2009 bulan desember dengan jumlah Rp 52,571 triliun. Perkembangan yang menarik ini jika kita pantau lebih dalam lagi dapat terlihat seperti dalam tabel 4.4 dan ditunjukkan sepintas dengan melalui gambar gambar 4.2 berikut ini:

Tabel 4.4

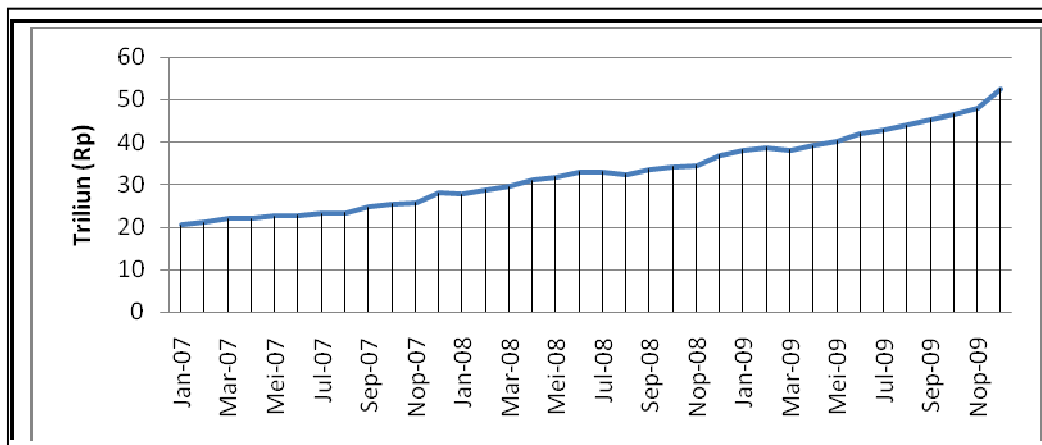
Jumlah Penghimpunan Dana Pihak Ketiga Bank Syariah 2007-2009

Tahun/Bulan	Jumlah Penghimpunan Dana (Triliun Rp)	Tahun/Bulan	Jumlah Penghimpunan Dana (Triliun Rp)
2007;01	20,514	2008;07	32,898
2007;02	21,054	2008;08	32,359
2007;03	21,883	2008;09	33,569
2007;04	22,008	2008;10	34,118
2007;05	22,570	2008;11	34,422
2007;06	22,714	2008;12	36,852
2007;07	23,232	2009;01	38,195
2007;08	23,309	2009;02	38,651
2007;09	24,680	2009;03	38,040
2007;10	25,473	2009;04	39,193
2007;11	25,658	2009;05	40,288
2007;12	28,012	2009;06	42,103
2008;01	27,696	2009;07	43,004
2008;02	28,731	2009;08	44,019
2008;03	29,552	2009;09	45,381
2008;04	31,064	2009;10	46,500
2008;05	31,705	2009;11	47,887
2008;06	33,049	2009;12	52,571

Sumber : SEKI BI, 2009

Gambar 4.2

Pertumbuhan Jumlah Penghimpunan Dana Pihak Ketiga 2007-2009



Sumber: Data diolah

4.2.3. Tingkat Inflasi di Indonesia pada Masa Penelitian

Pada data yang ada dalam SEKI BI menunjukkan tingkat laju inflasi Indonesia pada umumnya mengalami alur zigzag yaitu tinggi rendah tingkat inflasi terjadi pada tahun penelitian. Bulan januari tahun 2007 menunjukkan laju inflasi sebesar 6,26 % dan hal ini terus naik sampai tiga bulan berikutnya dan turun dari 6,52% di bulan maret turun menjadi 6,29% di bulan april, keadaan ini terus menurun sampai juni hingga mencapai 5,77%, untuk bulan kedepannya kenaikan berangsur stabil sampai bulan oktober 2007. Bulan september sampai awal tahun 2008 tingkat inflasi kembali menunjukkan penurunan.

Pada tahun 2008 tingkat laju inflasi pada bulan kedua mengalami kenaikan secara signifikan sampai pada bulan ketujuh atau bulan juli sampai 11,90% dan turun sebesar 0,5% pada bulan berikutnya dan naik lagi pada bulan berikutnya sampai 12,14% di bulan september, tetapi hal ini tidak berlangsung lama karena pada bulan berikutnya mulai turun lagi meski sedikit yakni bulan oktober

sebesar 11,77%, kondisi ini awal dari inflasi sesudahnya karena pada bulan-bulan berikutnya tingkat laju inflasi turun secara mengejutkan sampai tahun 2009 dan hingga mencapai 2,78% pada desember 2009.

Tahun 2009 menjadi tahun jinak bagi inflasi yang hanya 2,78%. Menurut Rusman, salah satu faktor landasan inflasi adalah pemulihan ekonomi domestik. Selain itu, krisis ekonomi dunia dan *fluktuasi* nilai tukar rupiah juga menjadi faktor rendahnya inflasi. Rusman menambahkan, laju inflasi yang rendah sepanjang 2009 juga disebabkan oleh deflasi pada barang-barang yang ditetapkan pemerintah, seperti BBM dan listrik.

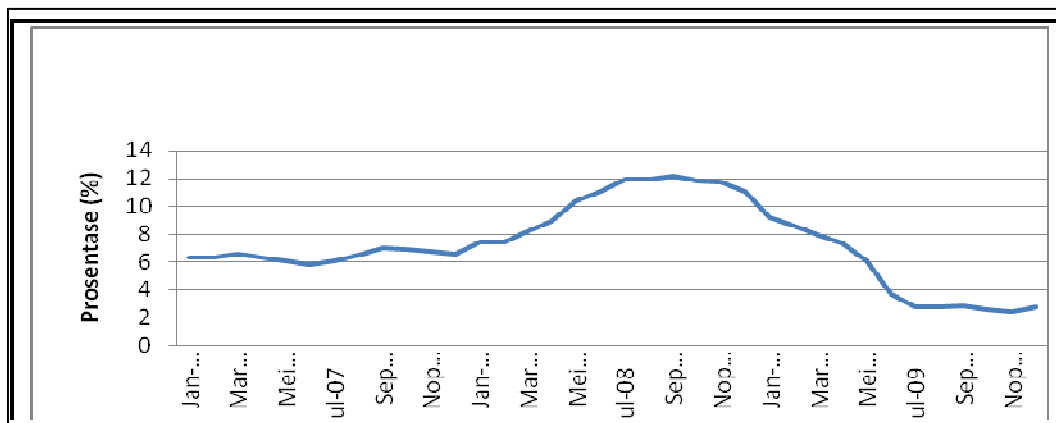
Seperti dalam tabel 4.5 dan gambar grafik 4.3 dibawah ini:

Tabel 4.5
Laju Inflasi Indonesia Tahun 2007-2009

Tahun/Bulan	Inflasi %	Tahun/Bulan	Inflasi %
2007;01	6,26	2008;07	11,90
2007;02	6,30	2008;08	11,85
2007;03	6,52	2008;09	12,14
2007;04	6,29	2008;10	11,77
2007;05	6,01	2008;11	11,68
2007;06	5,77	2008;12	11,06
2007;07	6,06	2009;01	9,17
2007;08	6,51	2009;02	8,60
2007;09	6,95	2009;03	7,92
2007;10	6,88	2009;04	7,31
2007;11	6,71	2009;05	6,04
2007;12	6,59	2009;06	3,65
2008;01	7,36	2009;07	2,71
2008;02	7,40	2009;08	2,75
2008;03	8,17	2009;09	2,83
2008;04	8,96	2009;10	2,57
2008;05	10,38	2009;11	2,41
2008;06	11,03	2009;12	2,78

Sumber : SEKI BI, 2009

Gambar 4.3
Pertumbuhan Laju Inflasi 2007-2009



Sumber: Data diolah

4.2.4. Tingkat Margin Pembiayaan UKM Bank Syariah di Indonesia

Dalam data SEKI BI menunjukkan kondisi tingkat margin pembiayaan bank-bank syariah yang menjadi sumber penelitian mulai tahun 2007 sampai 2009.

Laju perkembangan tingkat margin pembiayaan bank syariah pada awal tahun penelitian 2007 bulan Januari menunjukkan 14,42 % tingkat margin yang termasuk tinggi, tetapi pada bulan-bulan selanjutnya mengalami peningkatan sesuai dengan keadaan perkembangan tingkat suku bunga pada bank umum yang menyebabkan tingkat margin pembiayaan pada bank syariah ikut naik (www.khotibulumam.com). Pada bulan Juli tingkat margin naik mencapai 16,01 % hal ini berlanjut sampai awal tahun 2008 yang mencapai 18,23 %. Selanjutnya pada bulan-bulan berikutnya kenaikan ini berangsur-angsur naik secara signifikan hingga mencapai bulan Oktober 2008 yang mencapai 19,41 %, pencapaian ini termasuk tinggi karena setelah bulan-bulan berikutnya keadaan

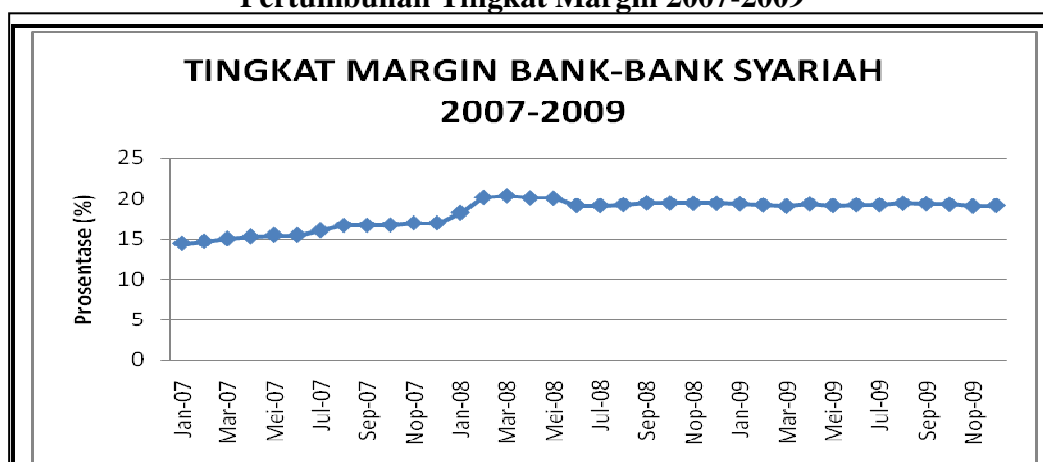
margin pembiayaan berangsur normal dengan kisaran 19,38 % sampai akhir penelitian desember 2009 mencapai 19,01 %.

Tabel 4.6
Tingkat Margin Bank Syariah 2007-2009

Tahun/Bulan	Margin/Bagi Hasil (%)	Tahun/Bulan	Margin/Bagi Hasil (%)
2007;01	14,42	2008;07	19,10
2007;02	14,67	2008;08	19,22
2007;03	14,99	2008;09	19,43
2007;04	15,25	2008;10	19,41
2007;05	15,44	2008;11	19,38
2007;06	15,44	2008;12	19,38
2007;07	16,01	2009;01	19,32
2007;08	16,66	2009;02	19,17
2007;09	16,67	2009;03	19,01
2007;10	16,71	2009;04	19,30
2007;11	16,93	2009;05	19,10
2007;12	16,93	2009;06	19,19
2008;01	18,23	2009;07	19,19
2008;02	20,11	2009;08	19,38
2008;03	20,31	2009;09	19,33
2008;04	20,04	2009;10	19,25
2008;05	20,01	2009;11	19,01
2008;06	19,11	2009;12	19,11

Sumber : SEKI BI, 2009

Gambar 4.4
Pertumbuhan Tingkat Margin 2007-2009



Sumber: Data diolah

4.3. Pengujian Statistik

4.3.1. Analisis Regresi Linear Berganda

Untuk mengetahui pengaruh antara variabel independen (Jumlah dana pihak ketiga, Inflasi, dan Margin) dengan variabel dependen (alokasi pembiayaan UKM). Hasil persamaan regresi dapat dilihat, sebagai berikut:

$$Y = -0,152 + 0,781X_1 + 0,348X_2 + -0,232X_3$$

1. -0,152 (Alokasi Pembiayaan UKM).

Nilai jumlah alokasi pembiayaan UKM apabila tidak dipengaruhi oleh ketiga variabel independen (Jumlah dana pihak ketiga, Inflasi, Margin pembiayaan) akan mengalami penurunan sebesar -0,152%.

2. 0,781 (b_1, X_1) Jumlah Dana Pihak Ketiga.

Nilai koefisien regresi b_1 ini menunjukkan bahwa setiap perubahan variabel X_1 (jumlah dana pihak ketiga) sebesar satu satuan atau 1% akan memberikan kontribusi terhadap perubahan jumlah dana pihak ketiga sebesar 0,781% dengan asumsi variabel lain tetap.

Dari hasil perhitungan SPSS 12.00 for windows terlihat bahwa variabel jumlah dana pihak ketiga berpengaruh positif terhadap jumlah alokasi pembiayaan UKM pada bank-bank syariah di Indonesia pada tahun 2006 sampai 2009, sehingga mengandung arti setiap kenaikan variabel jumlah dana pihak ketiga maka alokasi dana pembiayaan UKM akan naik sebesar 0,781 %.

3. 0,348 (b_2, X_2) Inflasi.

Nilai koefisien regresi b_2 ini menunjukkan bahwa setiap perubahan variabel X_2 (Inflasi) naik sebesar 1 % maka akan mengakibatkan kenaikan pada jumlah pembiayaan UKM sebesar 0,348% dengan asumsi variabel lain tetap

Dari hasil perhitungan SPSS terlihat bahwa variabel Inflasi berpengaruh positif terhadap jumlah alokasi pembiayaan UKM pada bank-bank syariah di Indonesia pada tahun 2006 sampai 2009, sehingga mengandung arti setiap kenaikan inflasi maka jumlah alokasi dana pihak ketiga akan naik sebesar 0,348 %.

4. -0,232 (b_3, X_3) Margin.

Nilai koefisien regresi b_3 ini menunjukkan bahwa setiap perubahan variabel X_3 (margin pembiayaan) sebesar satu satuan atau 1% akan memberikan penurunan terhadap perubahan pembiayaan sebesar -0,232% dengan asumsi variabel lain tetap. Semakin tinggi bank syariah mengenakan margin pembiayaan, minat masyarakat untuk meminjam pembiayaan semakin berkurang, sebab mereka dihadapkan dengan jumlah pembayaran pembiayaan ditambah margin yang tinggi. Dan ini memberatkan masyarakat yang bersangkutan dalam meminjam dan melunasi pembiayaannya dimasa yang akan datang. Namun sebaliknya, apabila bank mengenakan margin pembiayaan (pinjaman) yang rendah maka minat masyarakat dalam meminjam kredit

bertambah besar, khususnya pembiayaan Usaha Kecil dan Menengah (UKM).
(hasil olah data bisa dilihat pada lampiran 2)

Tabel 4.7
Analisis Regresi Berganda

Model	B	Std. Error
Alokasi Pembiayaan	-.152	2.496
Jumlah Dana Pihak Ketiga	.781	.047
Inflasi	.348	.096
Margin Pembiayaan	-.232	.224

Sumber: Data diolah

4.4. Hasil Uji Hipotesis Statistik

4.4.1. R Square (R^2)

Dalam perhitungan dari modal regresi logaritma ini menghasilkan nilai R square (R^2) sebesar 0.969 artinya adalah variasi alokasi pembiayaan UKM dari bank-bank syariah di Indonesia dapat dijelaskan oleh model sebesar 96,9 % dan sisanya dijelaskan oleh variabel lain diluar model. Variabel independen (jumlah dana pihak ketiga, inflasi, margin pembiayaan) secara keseluruhan menyumbang atau berkontribusi terhadap variabel dependen (pembiayaan UKM) sebesar 96,9 % dan yang sisanya sebesar 3,1 % dari variabel lain yang tidak dimasukkan dan diteliti dalam persamaan tersebut. Nilai dari R square yang mendekati satu menunjukkan baiknya garis regresi dan dapat menjelaskan data aktualnya. (bisa dilihat pada lampiran 1)

4.4.2. Analisis Varian (Hasil dari Uji F)

Untuk menguji signifikansi koefisien korelasi ini kita dapat melihat pada nilai sig atau dengan uji F pada tabel ANOVA. Dengan menggunakan uji signifikansi, rumusan hipotesis yang akan diuji adalah:

1. H_0 diterima apabila $F \text{ hitung} \leq F \text{ tabel} (2,86)$ dan taraf nyata 5%

Hal ini berarti variabel bebas secara simultan tidak berpengaruh nyata (signifikan) terhadap variabel terikat.

2. H_1 diterima apabila $F \text{ hitung} > F \text{ tabel} (2,86)$ dan taraf nyata 5%

Hal ini berarti variabel bebas secara simultan berpengaruh nyata (signifikan) terhadap variabel terikat.

Tabel 4.8
Analisis Varian (Uji F)

	Model	F	Sig.
1	Regression	332.932	.000
	Residual		
	Total		

Sumber: Data diolah

Dalam analisis varian hasil dari uji F ditemukan bahwa nilai F tabel adalah 2,86 diperoleh dari tabel nilai kritis distribusi dengan $n = 36$, $k = 4$ didapat derajat bebas pembilang = 3 ($k-1$) dan derajat bebas penyebut = 32 ($n-k$), sedangkan nilai F hitung sebesar 332.932 dengan begitu maka $F \text{ hitung} > F \text{ tabel}$ dapat dikatakan bahwa ketiga variabel independen secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependennya. yang mengindikasikan bahwa H_0 ditolak dan H_1 diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel

jumlah dana pihak ketiga, inflasi dan margin pembiayaan secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan jumlah alokasi pembiayaan UKM. (bisa dilihat pada lampiran 1)

4.4.3. Analisis T-test

Untuk memperoleh keyakinan tentang kebaikan dari model regresi dalam memprediksi, kita harus menguji signifikansi dari masing-masing koefisien dari model, maka dilakukan uji t. Adapun kriteria uji t yang digunakan adalah:

1. H_0 diterima apabila $t \text{ hitung} \leq t \text{ table} (2,038)$ dan taraf nyata 5%

Hal ini berarti variabel dependen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel independen.

2. H_1 diterima apabila $t \text{ hitung} > t \text{ table} (2,038)$ dan taraf nyata 5%

Hal ini berarti variabel dependen berpengaruh signifikan terhadap variabel independen.

Tabel 4.9
Analisis T-test

Model	t	Sig.
Alokasi Pembiayaan	-.061	.952
Jumlah Dana Pihak Ketiga	16.619	.000
Inflasi	3.569	.001
Margin Pembiayaan	-1.034	.309

Sumber: Data diolah

Dalam uji t satu sisi dengan alpha 0,05 ditemukan bahwa nilai dari t tabel adalah (2,038) diperoleh dari tabel distribusi t-student $n = 36$, $k = 4$ sehingga diperoleh $df = 32$ ($n - k$) dengan taraf nyata 5% dan uji dua arah, sedangkan pada

ketiga variabel independen tersebut setelah diuji menghasilkan temuan sebagai berikut:

1. Pada variabel independen jumlah dana pihak ketiga ditemukan bahwa nilai dari t hitungnya adalah sebesar 16,619, karena t hitung $>$ t tabel dan berada di daerah menerima H_1 , maka artinya adalah signifikan yaitu variabel independen jumlah dana pihak ketiga mempengaruhi variabel dependen pembiayaan UKM. (bisa dilihat pada lampiran 2)
2. Pada variabel independen inflasi ditemukan bahwa nilai dari t hitungnya adalah sebesar 3,569, karena t hitung $>$ t tabel dan berada di daerah menerima H_1 , maka artinya adalah signifikan yaitu variabel independen inflasi mempengaruhi variabel dependen pembiayaan UKM. (bisa dilihat pada lampiran 2)
3. Pada variabel independen tingkat margin pembiayaan ditemukan bahwa nilai dari t hitungnya adalah sebesar -1.034, karena t hitung $<$ t tabel dan berada di daerah menerima H_0 , maka artinya adalah tidak signifikan yaitu variabel independen tingkat margin pembiayaan tidak mempengaruhi variabel dependen pembiayaan UKM (bisa dilihat pada lampiran 2)

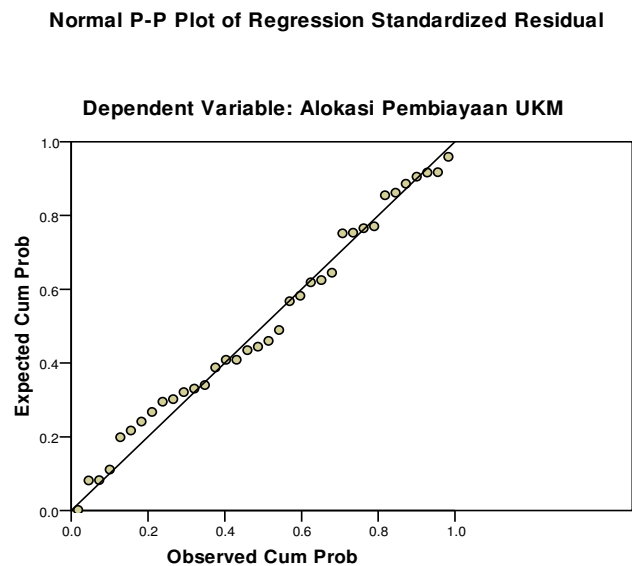
4.4.4. Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Pengujian normalitas adalah pengujian tentang kenormalan distribusi data. Untuk mengetahui bentuk kenormalan distribusi data salah satu cara yang dapat kita gunakan yaitu grafik distribusi dengan ketentuan, data terdistribusi secara normal akan mengikuti pola distribusi normal dimana bentuk grafiknya mengikuti bentuk lonceng.

Hasil pengujian untuk membuktikan distribusi normal pada seluruh variable dapat dicermati pada grafik distribusi berikut:

Gambar 4.5
Uji Normalitas Data



Dari grafik terlihat bahwa nilai plot PP terletak disekitar garis diagonal. Plots PP tidak menyimpang jauh dari garis diagonal, sehingga bisa diartikan

bahwa distribusi data harga saham adalah normal, sehingga bisa dilakukan regresi dengan model linier berganda.

2. Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinieritas diperlukan untuk mengetahui ada tidaknya variabel independen yang memiliki kemiripan dengan variabel independen lain dalam satu model. Kemiripan antar variabel independen dalam suatu model akan menyebabkan terjadinya korelasi yang sangat kuat antara suatu variabel independen dengan variabel independen yang lain. Deteksi multikolinieritas pada suatu model dapat dilihat dari beberapa hal, yaitu jika *Variance Inflation Factor* (VIF) tidak lebih dari 10 dan jika *Tolerance* tidak kurang dari 0,1, maka model dapat dikatakan terbebas dari multikolinearitas. (Agung, 2005; 58)

Dalam penelitian ini diperoleh nilai VIF seperti tabel dibawah ini:

Tabel 4.10
Uji Moltikolinieritas

Variabel Bebas	T	Sig.	Collinearity Statistics	
			Tolerance	VIF
Jumlah Dana Pihak Ketiga	16,619	0,000	0,232	4,302
Inflasi	3,569	0,001	0,468	2,138
Margin Pembiayaan	-1,034	0,309	0,243	4,110

Variabel Terikat : Alokasi Pembiayaan UKM

Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel jumlah dana pihak ketiga, inflasi, margin pembiayaan terhadap alokasi pembiayaan usaha kecil dan menengah tidak terjadi multikolinieritas.

3. Heterokedastisitas

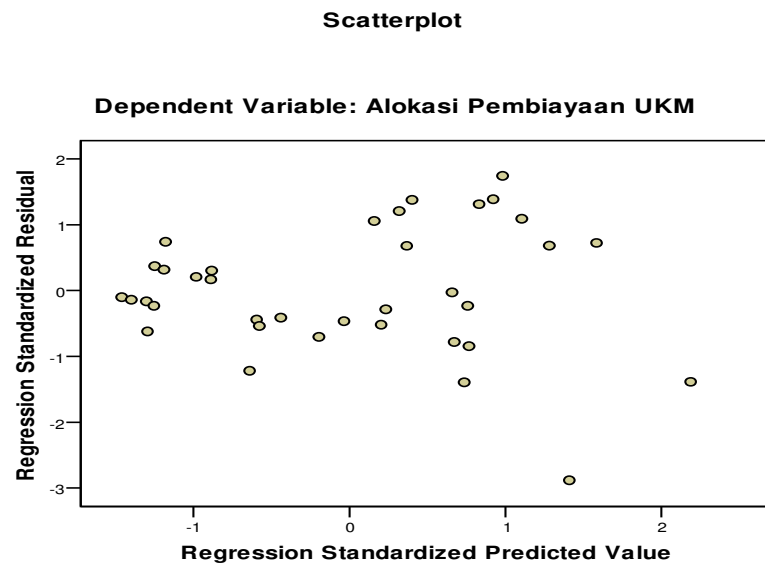
Heterokedastisitas menguji terjadinya perbedaan *variance residual* suatu periode pengamatan ke periode pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah model regresi yang memiliki persamaan *variance residual* suatu periode pengamatan dengan periode pengamatan yang lain sehingga dapat dikatakan model tersebut homokedastisitas dan tidak terjadi heterokedastisitas. Cara memprediksi ada tidaknya homokedastisitas pada suatu model dapat dilihat dari pola gambar Scatterplot model tersebut, analisisnya dapat dilihat jika:

- a. Titik-titik data menyebar di atas dan di bawah atau di sekitar angka 0.
- b. Titik-titik data tidak mengumpul hanya di atas atau di bawah saja.
- c. Penyebaran titik-titik data tidak boleh membentuk pola bergelombang melebar kemudian menyempit dan melebar kembali.
- d. Penyebaran titik-titik data sebaiknya tidak berpola. (Agung, 2005; 62-65)

Hasil pengujian dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

Gambar 4.6

Uji Heteroskedastisitas



Dari gambar tersebut terlihat bahwa penyebaran nilai – nilai residual di atas dan di sekitar angka 0, dan terlihat plot yang terpecah dan tidak membentuk pola tertentu. Dengan demikian, dapat disimpulkan tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.

4. Autokorelasi

Menguji autokorelasi dalam suatu model bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya korelasi antara variabel pengganggu (e_t) pada periode tertentu dengan variabel pengganggu periode sebelumnya (e_{t-1}). Cara mudah mendeteksi autokorelasi dapat dilakukan dengan uji Durbin Watson. Model regresi linier berganda terbebas dari autokorelasi jika nilai Durbin hitung terletak di daerah *No Autocorelasi*. Penentuan letak tersebut dibantu dengan tabel dl dan du ,

dibantu dengan nilai k (jumlah variabel independen). (Agung, 2005; 59).

Aturan pengujiannya adalah:

- a. $0 < d < d_L$: tidak ada korelasi diri positif (Tolak H_0) atau terdapat masalah autokorelasi
- b. $d_L < d < d_u$: tidak ada korelasi diri positif (Tidak ada) atau tidak ada masalah autokorelasi
- c. $4 - d_u < d < 4$: tidak ada korelasi diri negatif (Tolak H_0) atau terdapat masalah autokorelasi
- d. $4 - d_u < d < 4 - d_L$: tidak ada korelasi diri negatif (Tidak ada) atau tidak ada masalah autokorelasi.
- e. $d_u - d < 4 - d_u$: tidak ada korelasi diri positif/negatif (Terima H_0) atau tidak ada masalah autokorelasi.

Hasil pengujian dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4. 11
Uji Autokorelasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.984(a)	.969	.966	1,16645	1.409

- a. Predictors: (Constant), Margin Pembiayaan, Inflasi, Jumlah dana pihak ketiga
- b. Dependent Variable: Alokasi Pembiayaan UKM

Sebelumnya perlu diketahui nilai d tabel dengan $n = 36$, $k = 3$ dihasilkan nilai d tabel yaitu $d_L = 1,29$ dan $d_u = 1,65$. Dari tabel diatas terlihat nilai $DW = 1,409$. Berdasarkan kaidah keputusan uji d Durbin – Watson, maka dapat

diketahui bahwa nilai d terletak pada range $d_L < d < d_U$ yang berarti tidak ada masalah autokorelasi.

4.5. Pembahasan Hasil Penelitian

4.5.1. Pengaruh Jumlah Dana Pihak Ketiga, Inflasi, dan Tingkat Margin Secara Simultan terhadap Alokasi Pembiayaan UKM

Untuk memperoleh keyakinan tentang kebaikan dari model regresi dalam memprediksi pengaruh variabel independen terhadap variabel independen kita harus menguji dengan berdasarkan uji F (Uji Varian) dimana dengan melihat apakah secara bersama-sama variabel alokasi pembiayaan UKM dipengaruhi oleh variabel jumlah dana pihak ketiga, inflasi, dan tingkat margin pada bank syariah di Indonesia, hal ini dapat dilihat dari pengujian secara serempak yang telah dilakukan dan diperoleh hasil ternyata $F\text{-Test} > F\text{-tabel}$. Dalam analisis varian hasil dari uji F ditemukan bahwa nilai F tabel adalah 2,86, diperoleh dari tabel nilai kritis distribusi dengan $n = 36$, $k = 4$ dan diperoleh derajat bebas pembilang = $3 (k-1)$ dan derajat bebas penyebut = $32 (n-k)$, sedangkan nilai F hitung sebesar 332.932, maka dapat dikatakan bahwa ketiga variabel independen secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependennya. yang mengindikasikan bahwa H_0 ditolak dan H_1 diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel jumlah dana pihak ketiga, inflasi dan margin pembiayaan secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan jumlah alokasi pembiayaan UKM

Selain itu dengan melihat dalam perhitungan dari modal regresi logaritma ini menghasilkan nilai R square (R^2) sebesar 0.969 artinya adalah variasi alokasi pembiayaan UKM dari bank-bank syariah di Indonesia dapat dijelaskan oleh model sebesar 96,9 % dan sisanya dijelaskan oleh variabel lain diluar model. Variabel independen (jumlah dana pihak ketiga, inflasi, margin pembiayaan) secara keseluruhan menyumbang atau berkontribusi terhadap variabel dependen (pembiayaan UKM) sebesar 96,9 %, dan yang sisanya sebesar 3,1 % dari variabel lain yang tidak dimasukkan dan diteliti dalam persamaan tersebut. Nilai dari R square yang mendekati satu menunjukkan baiknya garis regresi dan dapat menjelaskan data aktualnya.

Dalam penelitian yang telah dilakukan dengan menggunakan dua metode dalam regresi linier berganda telah jelas bahwa ketiga variabel tersebut sangat berpengaruh terhadap pembiayaan UKM, suku bunga riil pinjaman, tingkat inflasi di Indonesia dan jumlah penghimpunan dana oleh bank-bank umum di Indonesia mempengaruhi secara serentak dan individu terhadap alokasi KUK pada bank-bank umum di Indonesia (www.Pustaka.net) Untuk itu pihak perbankan hendaknya mengusahakan agar semakin banyak nasabah yang *surplus* dana agar mau menyimpan uangnya di bank dan tentunya dengan strategi yang digunakan agar keadaan perekonomian Indonesia terus berputar dan berkembang dengan pemberian dana pada pihak yang *defisit* dana khususnya UKM, selain itu hendaknya pemerintah terus menjaga stabilitas inflasi agar dapat menjaga tingkat suku bunga yang akhirnya juga mengubah tingkat margin agar selalu stabil.

Hasil penelitian ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Ningrulk Mulyana dan Cokro Wahyu Sujati dimana dalam penelitian tersebut menganalisis pengaruh kredit Usaha Kecil (UK) terhadap faktor-faktor yang mempengaruhinya.

4.5.2. Pengaruh Jumlah Dana Pihak Ketiga, Inflasi dan Tingkat Margin Secara Individu terhadap Alokasi Pembiayaan UKM

1. Jumlah Dana Pihak Ketiga

Menurut Kasmir (2004: 91), Dana pihak ketiga merupakan dana dari masyarakat dapat berupa giro (*demand deposit*), tabungan (*saving deposit*), dan deposito berjangka (*time deposit*) yang berasal dari nasabah perorangan atau badan dan kemudian kegiatan yang dilakukan bank setelah itu adalah menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkannya. Kegiatan penyaluran dana ini dikenal dengan istilah alokasi dana. Pengalokasian dana dapat diwujudkan dalam bentuk pinjaman atau lebih dikenal dengan kredit atau pada bank syariah (pembiayaan).

Pada analisis data kuantitatif yang telah dihitung dengan menggunakan SPSS windows 12.00 dapat kita ketahui bahwa Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh kuat terhadap pemberian pembiayaan pada UKM pada bank syariah di Indonesia, dijelaskan bahwa variabel bebas jumlah dana pihak ketiga berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel terikat alokasi pembiayaan UKM pada bank-bank syariah di Indonesia tahun 2006 sampai 2009, Hal ini didukung oleh hasil uji $t = 16,619$ dengan tingkat signifikansi 0,000 (signifikan

< 5%). Hal ini berarti hubungan antara Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap pembiayaan adalah kuat dan sangat berpengaruh.

Kenaikan dan penurunan alokasi pembiayaan UKM sangat dipengaruhi oleh jumlah dana yang tersimpan pada bank syariah. Semakin besar jumlah dana dari pihak ketiga yang ada pada bank syariah maka akan semakin besar pula jumlah alokasi pembiayaan UKM. Menurut teori (Rety Rizky Miranty: 2001) pihak bank syariah memerlukan dana dan salah satu sumber dananya adalah dari pihak ketiga. Dana ini didapat dari setoran-setoran yang dilakukan oleh para nasabah bank tersebut. Setelah mendapatkan suntikan salah satunya dari pihak ketiga ini, maka bank syariah dapat menyalurkan dana-dana tersebut kepada masyarakat, namun proporsi antara jumlah dana pihak ketiga yang dialokasikan kedalam pembiayaan harus diatur.

Hasil penelitian ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh cokro wahyu sujati dan ningrum muliyana dimana terdapat pengaruh antara jumlah dana pihak ketiga terhadap kredit usaha kecil (KUK).

2. Inflasi

Dalam banyak literatur disebutkan bahwa inflasi didefinisikan sebagai kenaikan harga umum secara terus menerus dari suatu perekonomian. Sedangkan menurut Sukirno (2004:33). Inflasi yaitu, kenaikan dalam harga barang dan jasa, yang terjadi karena permintaan bertambah lebih besar dibandingkan dengan penawaran harga di pasar.

Tingkat laju inflasi sangat berpengaruh pada kondisi perekonomian, khususnya kegiatan perbankan. Kondisi laju inflasi yang tinggi menyebabkan pemerintah (Bank Indonesia) mengeluarkan regulasi untuk menaikkan suku bunga simpanan bank-bank di Indonesia. Ini dalam rangka agar inflasi dapat terkendali. Namun akibat lainnya adalah bank-bank terpaksa menaikkan suku bunga pinjamannya (kredit). Ini dilakukan bank agar bank tidak mengalami *negative spread*. *Negative spread* adalah suatu kondisi dimana suku bunga simpanan lebih tinggi, dari suku bunga kredit. Apabila ini terjadi maka bank-bank akan kesulitan dalam menjalankan aktivitasnya. (Cokro, 2007: 63).

Dalam kaitannya dengan bank syariah adalah penerapan tingkat margin pembiayaan lazimnya pada bank syariah dengan menggunakan metode *going rate pricing*, yaitu menggunakan tingkat suku bunga pasar sebagai rujukan (*benchmark*). Hal ini dikarenakan bank umum kerkompetisi dengan bank syariah. (Muhammad, 2005: 137).

Perubahan tingkat inflasi yang saat ini turun membuat tingkat margin pada tahun 2009 yang dapat mencapai 19% atau pada tingkat sedikit kenaikan daripada tahun sebelumnya menjadikan perbedaan dengan teori yang ada, dimana menurut pemerintah (Bank Indonesia) ketika inflasi naik maka pemerintah melakukan regulasi untuk menaikkan suku bunga simpanan bank-bank di Indonesia.

Tingkat inflasi yang rendah dan tingkat suku bunga yang tetap tinggi pada tahun 2009 didukung juga pada penelitian tahun 1998 hingga pertengahan 2008, yakni ketika inflasi tinggi ternyata suku bunga mengecil dan sebaliknya

saat inflasi rendah sering memacu *spread* suku bunga membesar. Pada tahun 1998 terlihat jelas pada suatu kondisi ketika inflasi tinggi ternyata suku bunga turun, hal ini membuktikan inflasi yang meningkat direspon dengan kenaikan suku bunga untuk menjaga suku bunga riil positif, sehingga akibatnya *spread* berkurang. Fakta ini menyimpulkan bahwa inflasi tinggi sebagai kendala penurunan *spread* suku bunga. (Rina Indiasuti, 2009: 359)

Dalam hal ini inflasi yang sebenarnya berpengaruh terhadap tingkat suku bunga dan secara tidak langsung juga dapat mempengaruhi tingkat margin pembiayaan pada bank syariah jika dilihat dengan menggunakan analisis regresi berganda tidak mempengaruhi alokasi pembiayaan UKM pada bank syariah. Dari hasil regresi dapat dijelaskan bahwa variabel bebas inflasi berpengaruh positif terhadap variabel terikat alokasi pembiayaan UKM pada bank-bank syariah di Indonesia tahun 2006 sampai 2009, dimana kenaikan Inflasi akan mendorong alokasi pembiayaan UKM. Hal ini didukung oleh hasil uji $t = 3,569$ dengan tingkat signifikansi $0,000$ (signifikan $< 5\%$). Yang artinya secara parsial variabel inflasi berpengaruh signifikan alokasi pembiayaan UKM.

Hal ini bertolak belakang dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Cokro Wahyu Sujati yang menunjukkan bahwa inflasi berpengaruh karena kenaikan dan penurunan jumlah alokasi KUK pada bank umum sangat dipengaruhi oleh tingkat suku bunga. Semakin tinggi tingkat laju inflasi di Indonesia maka akan semakin tinggi tingkat suku bunga dan sebaliknya adalah akan semakin rendah jumlah alokasi KUK.

3. Margin Pembiayaan

Dalam kaitannya dengan bank syariah adalah penerapan tingkat margin pembiayaan lazimnya pada bank syariah dengan menggunakan metode *going rate pricing*, yaitu menggunakan tingkat suku bunga pasar sebagai rujukan (*benchmark*). Hal ini dikarenakan bank umum berkompetisi dengan bank syariah. (Muhammad, 2005: 137)

Dari hasil regresi dapat dijelaskan bahwa variabel independen margin pembiayaan (pinjaman) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap variabel independen alokasi pembiayaan UKM pada bank-bank syariah di Indonesia tahun 2006 sampai 2009. Hal ini tidak didukung oleh hasil uji $t = -1,034$ dengan tingkat signifikansi 0,309 (tidak signifikan $> 5\%$). Yang artinya variabel margin pembiayaan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap alokasi pembiayaan UKM. Hal ini mengindikasikan kenaikan dan penurunan jumlah alokasi pembiayaan UKM sangat dipengaruhi oleh margin pembiayaan (pinjaman) bank syariah. Semakin tinggi tingkat margin pembiayaan (pinjaman) bank syariah maka kebalikannya adalah, akan semakin rendah jumlah alokasi pembiayaan UKM. Pengaruh ini terjadi karena ketika tingkat margin naik maka minat masyarakat untuk meminjam pembiayaan semakin berkurang, sebab mereka dihadapkan dengan jumlah pembayaran pembiayaan ditambah margin yang tinggi. Dan ini memberatkan masyarakat yang bersangkutan dalam meminjam dan melunasi pembiayaannya dimasa yang akan datang.

Hal ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Cokro Wahyu Sujati yang menunjukkan bahwa secara parsial variabel Kredit Usaha Kecil (KUK) pembiayaan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap perubahan alokasi pembiayaan UK (Usaha Kecil) pada bank-bank umum di Indonesia.

4.5.3. Jumlah Dana Pihak Ketiga Mempunyai Pengaruh Dominan Terhadap Alokasi Pembiayaan UKM

Dari variabel jumlah dana pihak ketiga, inflasi, dan margin yang berpengaruh dominan terhadap alokasi pembiayaan UKM yaitu variabel jumlah dana pihak ketiga dengan melihat nilai t hitung sebesar 16,619 yaitu atau koefisien regresi sebesar 0,781 yang mempunyai nilai paling besar diantara variabel terikat lainnya.

Berdasarkan hasil analisis di atas dapat dijelaskan bahwa pendugaan jumlah dana pihak ketiga sebagai variabel paling dominan mempengaruhi Alokasi Pembiayaan UKM adalah benar adanya, dengan asumsi bahwa dari ketiga variabel independen (jumlah dana pihak ketiga, inflasi, dan margin) yang ada dalam model regresi, variabel jumlah dana pihak ketiga merupakan variabel paling berkaitan dengan alokasi pembiayaan UKM yaitu menjual kembali dana yang yang diperoleh dari penghimpunan dana (dana pihak ketiga), Menurut teori (Rety Rizky Miranty: 2001) pihak bank syariah memerlukan dana dan salah satu sumber dananya adalah dari pihak ketiga.

Selain itu berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Cokro Wahyu Sujati dan Ningrum Mulyana yang menunjukkan terdapat pengaruh

yang dominan pada dana pihak ketiga pada bank-bank umum terhadap alokasi KUK daripada dua variabel independen lainnya.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Dari proses dalam penelitian ini penulis menemukan sejumlah temuan yang dapat dijadikan sebagai simpulan. Kesimpulan tersebut merupakan temuan dari analisis yang telah dilakukan oleh penulis, dalam mencari faktor-faktor yang mempengaruhi alokasi pembiayaan usaha kecil dan menengah (UKM) pada bank-bank syariah di Indonesia. Rumusan masalah dengan demikian sudah dapat terjawab secara jelas. Fakta-fakta tersebut menjadi jawaban dan bagian akhir atas pertanyaan awal pada rumusan masalah di saat penyusunan penelitian.

Berdasarkan penelitian yang telah diuraikan secara statistik diatas, maka untuk memperoleh gambaran hasil penelitian yang lebih komprehensif akan ditelaah lebih lanjut setiap data hasil perhitungan sesuai dengan aspek keuangan yang mendasari, dapat diuraikan di bawah ini:

1. Pengaruh variabel dependent terhadap variabel independent yang menggunakan metode Regresi Linier Berganda ini juga membuktikan bahwa model yang dipakai adalah tepat. R square pada model menunjukkan angka 96,9 % yang berarti nilai dari R square tersebut adalah baik dan tepat karena dapat menunjukkan data aslinya dengan derajat mendekati 1 atau 100 %. Uji F yaitu uji apakah secara keseluruhan ketiga variabel independen mempengaruhi variabel dependennya terjawab dengan ketiga variabel independen tersebut berpengaruh signifikan terhadap variabel dependennya.

2. Pengaruh variabel dependent terhadap variabel independent secara individu mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap alokasi pembiayaan UKM, dengan menggunakan uji signifikansi dan uji T-test dapat dilihat bahwa jumlah dana pihak ketiga dan inflasi mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap alokasi pembiayaan UKM, sehingga semakin tinggi jumlah yang terkumpul dan semakin naik tingkat inflasi di Indonesia maka akan menyebabkan kenaikan jumlah dana yang dikeluarkan pada alokasi pembiayaan UKM, sedangkan pada tingkat margin nilai T-test nya menunjukkan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap alokasi pembiayaan UKM, dapat disimpulkan bahwa semakin rendah tingkat margin yang ditawarkan bank syariah orang yang maka banyak nasabah yang mau menggunakan jasa meminjam pada bank syariah dan akan semakin tinggi alokasi pembiayaan UKM yang dikeluarkan bank syariah.
3. Pengaruh variabel independent yang dominan terhadap variabel dependet adalah jumlah dana pihak ketiga, pengaruh dominan ini dapat ditunjukkan pada uji-T test yang menunjukkan 16,619 pengaruh ini paling besar dari pada pengaruh lainnya yang hanya 3,569 pada Inflasi. Kenaikan dan penurunan alokasi UKM karenanya sangat dipengaruhi oleh jumlah dana yang tersimpan pada bank syariah. Semakin besar jumlah dana dari pihak ketiga yang ada pada bank syariah maka akan semakin besar pula alokasi UKM.

5.2. Saran

Penelitian tentang UKM ini terkandung di dalamnya bahwa, jika ingin memajukan dan mengembangkan sektor riil dari peranan UKM maka diperlukan cara untuk tercapai tujuan tersebut. Pendanaan UKM melalui pembiayaan UKM oleh pihak perbankan yaitu bank-bank syariah merupakan salah satu cara yang mudah dan tepat. UKM akan mampu mengembangkan diri karena memiliki modal atau tambahan modal, karenanya UKM patut mendapat perhatian, maka sebagai konsekuensinya faktor-faktor yang mempengaruhi alokasi pembiayaan UKM perlu mendapat kajian yang mendalam. Pengkajian tentangnya perlu karena dengannya akan dapat diperoleh ilmu tentang bagaimana supaya UKM bergerak.

Dari fakta-fakta yang ditemukan pada penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi alokasi kredit usaha kecil tersebut maka dapat ditarik sebuah implikasi teoritis darinya yaitu :

1. Pihak perbankan yaitu bank-bank syariah yang menyuplai dana kepada UKM diharapkan dapat bekerjasama dengan pemerintah untuk menciptakan kondisi moneter yang baik. Fungsi intermediasi bank syariah harus dilakukan sebagaimana mestinya. Bank-bank syariah diharapkan untuk lebih giat lagi dalam menghimpun dana dari pihak ketiga dengan berbagai strategi yang dapat digunakan. Seperti telah diketahui dari penelitian diatas yaitu jika jumlah penghimpunan dana semakin besar maka alokasi pembiayaan UKM juga semakin besar

2. Jika pemerintah ingin mengembangkan sektor riil melalui pengembangan usaha kecil dan menengah (UKM) maka pemerintah harus menjaga faktor-faktor yang mempengaruhi alokasi UKM. Stabilitas moneter patut menjadi agenda utama kebijakan ekonomi. Inflasi yang pada saat ini sangat baik dan termasuk paling baik dalam 10 tahun terakhir ini harus selalu dijaga dengan mempertahankan segala hal yang dapat mempengaruhi perubahan dari tingkat inflasi tersebut sehingga pengembangan UKM akan dapat lebih berkembang lagi untuk tahun kedepannya.

3. Pengembangan tingkat margin yang tinggi pada bank syariah ternyata tidak jauh berbeda dengan bank umum bahkan dapat dikatakan lebih tinggi, dan tingginya tingkat margin bank syariah akan mempengaruhi alokasi pembiayaan UKM. Pengendalian moneter untuk margin pembiayaan (pinjaman) diharapkan stabil mutlak diperlukan, sehingga masyarakat dengan pembiayaan pada bank syariah akan mampu menyerap UKM lebih optimal guna perkembangan UKM kedepannya.

4. Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Indonesia dituntut untuk melakukan proses produksi dengan produktif dan efisien, serta dapat menghasilkan produk yang sesuai dengan frekuensi pasar global dan salah satunya yakni dengan memanfaatkan pembiayaan yang ditawarkan pada bank di Indonesia baik bank umum maupun bank syariah untuk pengembangan produksinya, karena di Tahun 2010 AFTA-CINA telah banyak masuk pada

pasar Indonesia yang menyebabkan persaingan akan produk dalam negeri sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Agung Nugroho, Bhuoro. 2007. *Strategi Jitu Memilih Metode Statistik Penelitian dengan SPSS*, Yogyakarta: Penerbit ANDI.
- Antonio, Syafi'ie. 2001. *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani.
- Azhim, Abdul. 2007. *Al-wajiz*, Jakarta: Pustaka As Sunnah.
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Budi Santoso, Purbayu. 2005. *Analisis Statistik dengan MS. Excel dan SPSS*, Yogyakarta: Penerbit ANDI.
- Diana, Ilfi Nur. 2008. *Hadis-Hadis Ekonomi*, Malang: UIN Press.
- Ghofur Anshori, Abdul. 2009. *Hukum Perbankan Syariah (UU NO. 21 TAHUN 2008)*, Yogyakarta: PT. Refika Aditama.
- Huda, Nurul dan Mustafa Edwin Nasution. 2009. *Current Issue Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana.
- Indiastuti, Rina. 2009. *Spread Suku Bunga, Risiko, Dan Potensi Inefiensi Perbankan Indonesia*, Kapita Selektta Ekonomi Indonesia, Soeharsono Sagir, 359.
- Indriantoro, Nur dan Bambang Supoma. 1999. *Metode Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*, Yogyakarta: Penerbit BPFE.
- Kasmir. 2004. *Bank & Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

- Kuncoro, Mudrajad. 2007. *Makalah Seminar PSAK “Catatan Tentang Sektor Industri & UMM 10 tahun Pasca Krisis.*
- Lubis, Suhrawardi K. 2004. *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Masyhuri dan Zainuddin. 2008. *Metodologi Penelitian pendekatan praktis dan Aplikatif*, Bandung: Refika Aditama.
- Muhammad. 2005. *Manajemen Pembiayaan Bank Syari’ah*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- _____. 2006. *Bank Syari’ah Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman*, Yogyakarta: EKONOSIA Kampus Fakultas Ekonomi UII.
- Muliyana, Ningrum. 2002. *Pengaruh Pembiayaan Produktif Terhadap Peningkatan dan Pengembangan Usaha Kecil (Studi pada Pedagang Kecil di Pasar Induk Gadang Malang)*, Malang: UIN Malang.
- Munir, Misbahul. 2007. *Ajaran-ajaran Ekonomi Rasulullah Kajian Hadits Nabi dalam Prespektif Ekonomi*, Malang: UIN-Press.
- Sagir, Soeharsono. 2009. *Kapita Selektia Ekonomi Indonesia*, Jakarta: Kencana.
- Siamat, Dahlan. 2005. *Manajemen Lembaga Keuangan Kebijakan Moneter dan Perbankan*, Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Sudarsono, Heri. 2007. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: EKONOSIA Kampus Fakultas Ekonomi UII.
- Suhardjono. 2003. *Manajemen Perkreditan Usaha Kecil dan Menengah*, Yogyakarta: Penerbit UPP AMP YKPN.
- Suharyadi dan Purwanto. 2003, *Statistika Untuk Ekonomi & Keuangan Modern*, Jakarta: Salemba Empat.

Tambunan, Tulus T.H. 2003. *Perekonomian Indonesia Beberapa Masalah Penting*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Triandaru, Sigit dan Totok Budisantoso. 2008. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Jakarta: Salemba Empat.

Wahyu Sujati, Condro. 2007. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Alokasi KUK Pada Bank-Bank Umum di Indonesia (Pada tahun 2004:02-2005:12)*, Yogyakarta: UII Yogyakarta.

Infokop Nomor 25 Tahun xx, 2004

<http://seki-bi.com>. diakses tanggal 12 November 2009

<http://usaha-kecil.com>. diakses tanggal 21 Oktober 2009

<http://hmikomekunisba.blogspot.com>. diakses pada tanggal 29 Oktober 2009

<http://www.bi.go.id/web/id/Syariah/>. diakses pada tanggal 29 Oktober 2009

<http://bps.com>. diakses pada tanggal 28 Oktober 2009

<http://infoukm.wordpress.com>. diakses pada tanggal 22 November 2009

<http://khotibulumam.com>. diakses pada tanggal 22 November 2009

<http://rac.uui.ac.id>. diakses tanggal 21 November 2009

<http://hanieffeui.wordpress.com>. diakses tanggal 16 Desember 2009

<http://depkop.com>. diakses tanggal 10 Februari 2010

<http://elib.polban.ac.id> diakses tanggal 9 Maret 2010

Lampiran 1

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.984 ^a	.969	.966	1.16645

a. Predictors: (Constant), Margin Pembiayaan, Inflasi, Jumlah Dana Pihak Ketiga

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1358.966	3	452.989	332.932	.000 ^a
	Residual	43.539	32	1.361		
	Total	1402.506	35			

a. Predictors: (Constant), Margin Pembiayaan, Inflasi, Jumlah Dana Pihak Ketiga

b. Dependent Variable: Alokasi Pembiayaan UKM

Coefficient Correlations^c

Model			Margin Pembiayaan	Inflasi	Jumlah Dana Pihak Ketiga
1	Correlations	Margin Pembiayaan	1.000	-.695	-.862
Inflasi		-.695	1.000	.711	
Jumlah Dana Pihak Ketiga		-.862	.711	1.000	
	Covariances	Margin Pembiayaan	.050	-.015	-.009
Inflasi		-.015	.010	.003	
Jumlah Dana Pihak Ketiga		-.009	.003	.002	

a. Dependent Variable: Alokasi Pembiayaan UKM

Lampiran 2

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Correlations			Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Zero-order	Partial	Part	Tolerance	VIF
1	(Constant)	-.152	2.498		-.061	.952					
	Jumlah Dana Pihak Ketiga	.781	.047	1.074	16.619	.000	.976	.947	.518	.232	4.302
	Inflasi	.348	.098	.163	3.569	.001	-.183	.534	.111	.468	2.138
	Margin Pembiayaan	-.232	.224	-.065	-1.034	.309	.753	-.180	-.032	.243	4.110

a. Dependent Variable: Alokasi Pembiayaan UKM

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.984 ^a	.969	.966	1.16645	1.409

a. Predictors: (Constant), Margin Pembiayaan, Inflasi, Jumlah Dana Pihak Ketiga

b. Dependent Variable: Alokasi Pembiayaan UKM

Collinearity Diagnostics^a

Model	Dimension	Eigenvalue	Condition Index	Variance Proportions			
				(Constant)	Jumlah Dana Pihak Ketiga	Inflasi	Margin Pembiayaan
1	1	3.836	1.000	.00	.00	.00	.00
	2	.141	5.223	.00	.03	.31	.00
	3	.022	13.311	.14	.26	.25	.00
	4	.002	49.455	.86	.70	.44	1.00

a. Dependent Variable: Alokasi Pembiayaan UKM

Lampiran 3**Residuals Statistics^a**

	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	N
Predicted Value	14.6966	37.4170	23.7908	6.23118	36
Residual	-3.36287	2.03309	.00000	1.11534	36
Std. Predicted Value	-1.459	2.187	.000	1.000	36
Std. Residual	-2.883	1.743	.000	.956	36

a. Dependent Variable: Alokasi Pembiayaan UKM



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS EKONOMI**

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 005/BAN-PT/ Ak-X/S1/II/2007
Jalan Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 558881, Faksimile (0341) 558881
<http://www.ekonomi.uin-malang.ac.id>; e-mail : ekonomi@uin-malang.ac.id

BUKTI KONSULTASI

Nama : Luluk Chorida
NIM/Jurusan : 06610039/Manajemen
Pembimbing : Indah Yuliana, SE., MM
Judul Skripsi : Pengaruh Jumlah Dana, Inflasi, dan Tingkat Margin Terhadap Alokasi Pembiayaan Usaha Kecil dan Menengah (Studi pada Bank-Bank Syariah di Indonesia)

No.	Tanggal	Materi Konsultasi	Tanda Tangan Pembimbing
1.	17 September 2009	Pengajuan Judul	1.
2.	28 September 2009	Proposal	2.
3.	12 November 2009	Revisi Proposal	3.
4.	20 November 2009	Acc Proposal	4.
5.	4 Desember 2009	Seminar	5.
6.	22 Februari 2010	Revisi BAB I, II, III	6.
7.	15 Maret 2010	Acc BAB I, II, III	7.
8.	17 Maret 2010	Pengajuan BAB IV, V	8.
9.	19 Maret 2010	Revisi BAB IV, V	9.
10.	23 Maret 2010	Acc Keseluruhan	10.

Malang, 23 Maret 2010
Mengetahui
Dekan,

Drs. HA. MUHTADI RIDWAN, MA
NIP 19550302 198703 1 004

BIODATA PENELITIAN

A. Data Pribadi

1. Nama : Luluk Chorida
2. Tempat & Tanggal Lahir : Malang, 29 April 1988
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Alamat Asal : Jl. Kauman No. 10 RT/RW. 11/3 Gondanglegi
- Malang
5. Telepon & HP : 085790801049
6. E-mail : lu2k_nisti@yahoo.co.id

B. Riwayat Pendidikan Formal

1. TK : TK Salafiyah Khairudin Tahun 1992-1993
2. SD : SDI Salafiyah Khairudin Gondanglegi Tahun 1994-2000
3. SLTP : MTsN Malang III Gondanglegi Tahun 2000-2003
4. SMA : SMA Al-Rifa'ie Gondanglegi Malang Tahun 2003-2006
5. KULIAH : UIN MMI Malang Tahun 2006-2010

C. Riwayat Pendidikan Non Formal

1. Training Workshop Bintang Wirausaha Muda Mandiri
2. Pelatihan SPSS UIN MMI Malang
3. Seminar Cara Gila Jadi Pengusaha
4. IDX-Stock Exchange Game

D. Pengalaman Organisasi

1. Staff Administrasi Umum KOPMA Padang Bulan UIN MMI Malang
2. Staff Bendahara KOPMA Padang Bulan UIN MMI Malang
3. Sescom UIN MMI Malang

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan benar dan dapat dipertanggungjawabkan.

Malang, 10 April 2010

Luluk Chorida